

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 13/2012



ISSN: 2086-4833



9 772086 483008



Tim Redaksi Edukasi Keuangan mengucapkan:

*Selamat Hari Raya Natal
& Tahun Baru
2013*



Daftar Isi

4 LIPUTAN UTAMA *BMN Idle Harus Dikelola dengan Baik*

29 GERAJ BPPK

*Wanted!!!
Sosok Pemimpin
yang Dirindukan*

PROFIL 20

37 SERAMBI ILMU

*Assessment Ratio
(Menguji Akurasi Nilai
Jual Objek Pajak)*

Aris Maulana
*“Bekerja dengan
Hati”*

Liputan Utama	4
Liputan Khusus	16
Profil	20
Gerai BPPK	25
Serambi Ilmu	34
Klinik Sehat	50
Selasar Alumni	52
Mata Air	54
Info Diklat	56
Pojok IT	58
Resensi Buku	61
Kang Edu	63
Galeri BPPK	64

Salam Redaksi

Sidang pembaca yang kami hormati, tiada terasa akhir tahun kembali menyapa kita. Merupakan saat yang tepat bagi kita semua untuk berhenti sejenak, melihat kembali rencana awal tahun dan menelusuri langkah-langkah yang telah diambil sepanjang tahun ini. Apakah langkah yang kita ambil sudah tepat, atau malah menjauhkan kita dari rencana awal. Pada momen yang sama, Edukasi Keuangan juga terus melakukan evaluasi diri, sehingga di setiap terbitannya kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda, para pembaca setia.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai amanah dari UU Keuangan Negara. Pada edisi ini, kami mengetengahkan Pengelolaan BMN *Idle* sebagai liputan utama. Simak wawancara khusus yang kami hadirkan dengan Direktur Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang pengelolaan BMN *idle* yang baik. Kami juga menghadirkan liputan khusus tentang Wisuda Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di pertengahan Oktober 2012.

Upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara terus bergulir di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan penyempurnaan SPAN. Simak peran SPAN bagi kelangsungan reformasi pengelolaan keuangan negara pada rubrik Serambi Ilmu. Pada rubrik Gerai BPPK, Anda akan menemukan pandangan tentang sosok pemimpin yang dirindukan. Jangan lewatkan sajian khas Edukasi Keuangan lainnya pada edisi ini.

Ungkapan terimakasih kami sampaikan kepada pembaca yang telah mengirimkan tulisannya untuk memperkaya majalah ini, walaupun belum semua dapat kami muat. Kami tetap menunggu kontribusi Anda, baik berupa artikel, kritik, ataupun saran yang dapat menyempurnakan majalah ini melalui edukasikeuangan@gmail.com. Selamat Menikmati.

Susunan Redaksi



Penasehat

Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPk

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Umum

Iqbal Soenardi

Pemimpin Redaksi

Tanda Setiya

Redaktur

Surono

Sampurna Budi Utama

Noorcholis Madjid

Andy Prasetiawan Hamzah

Heru Supriyanto

Agus Hekso Pramudijono

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Pilar Wirotama

Gathot Subroto

Pemimpin Harian

Setyawan Dwi Antoro

Penyunting/Editor

Wawan Ismawandi

Romy Setiawan

Shera Betania

Yohana Tolla

Fotografer

Eros Lassa Mursalin

Layout/Desain Grafis

Muhammad Fath Kathin

Riko Febrialdo

Victorianus M. I. Bimo Adi

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Diah Nofita Rini

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5* maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@gmail.com. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Sambutan Menteri Keuangan



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perlu dilakukan pengendalian dan penataan atas Barang Milik Negara secara tepat, efektif dan optimal demi kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pengendalian dan penataan juga dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau lazim disebut sebagai BMN *idle*. Dalam rangka pelaksanaan *roadmap strategic asset management* terkait pengelolaan BMN *idle*, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga beserta peraturan pelaksanaannya.

Hal ini merupakan respon terhadap kebijakan utilisasi aset yang mengharuskan pengadaan BMN hanya untuk tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dengan lahirnya PMK ini diharapkan pemanfaatan BMN *idle* lebih optimal agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi APBN, mengingat APBN cukup responsif terhadap perubahan global. Dengan diangkatnya pengelolaan BMN *idle* sebagai laporan utama majalah Edukasi Keuangan edisi kali ini, maka diharapkan para pembaca memahami bagaimana pengelolaan BMN *idle* yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, di penghujung Tahun Anggaran 2012, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk senantiasa mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Kita harus bekerja dengan hati, memegang integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara, membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, meningkatkan pelayanan terhadap pemangku kepentingan, dan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang serta memberikan yang terbaik untuk menuju kesempurnaan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat membaca dan juga menyampaikan **Selamat Tahun Baru 2013**, semoga Kementerian Keuangan dapat selalu melaksanakan tugasnya dalam mengemban amanah rakyat Indonesia dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Agus D. W. Martowardojo

“BMN *IDLE* HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK”

OLEH: TIM LIPUTAN

Foto: M. Fath Kathin

Kementerian Keuangan selalu Pengelola BMN terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan BMN *idle*. BMN *idle* adalah BMN yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Kementerian dan Lembaga (K/L). Upaya untuk meningkatkan pengelolaan BMN *idle* ini dilakukan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penggunaan Barang Milik Negara dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Guna mengetahui lebih jauh tentang bagaimana upaya pengelolaan BMN *idle* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN, maka redaksi Majalah Edukasi Keuangan berkesempatan mewawancarai Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai hal dibicarakan dengan hangat oleh Bapak

Dedi Syarif Usman yang saat ini diberikan amanah selaku Direktur BMN. Berikut dituturkan kembali hasil wawancara tentang pengelolaan BMN *idle* yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2012 tersebut.

Latar Belakang

Apa yang melatarbelakangi pengelolaan BMN *idle*? Sebuah pertanyaan yang menjadi perhatian kita semua. Perlu diketahui sejak negara ini diproklamasikan, regulasi pengelolaan keuangan negara masih mengacu pada *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW) yang lebih banyak mengawasi pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya negara kita baru menyusun neraca tahun 2004, sebelumnya tidak punya neraca, hanya sifatnya laporan Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

Akhirnya bergulir reformasi di bidang keuangan negara (lahirnya UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, dan UU No. 15/2004), namun fokus awal reformasi pada kehati-hatian dalam pengelolaan uang dibanding dengan pengelolaan BMN. Makanya lebih banyak penertiban rekening liar dibanding penertiban BMN. Demikian juga unit Eselon I (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-red) yang fokus menangani BMN pun baru berdiri tahun 2006. Dulunya ada fungsi itu di Dirjen Anggaran, tapi itu kan tidak sampai ke KPKNL, sampai di Kanwil pun hanya bidang.

Maka secara bertahap sebagai ama-

nah juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengelolaan BMN mulai dibenahi. Oleh karena itu, kemudian lahirlah PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD. Dalam PP No. 6 tahun 2006 tersebut diamanatkan bahwa BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi K/L (BMN *idle*) wajib diserahkan kepada Pengelola BMN. Lebih lanjut Direktur BMN menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari membenahan pengelolaan BMN, pemerintah melaksanakan proses penertiban BMN yang dilakukan mulai Oktober 2007 sampai 2009, bahkan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Dari proses tersebut terlihat adanya indikasi bahwa banyak BMN yang tidak digunakan sesuai tusi atau belum digunakan sesuai dengan tusi.

Kemudian Pengelola BMN juga melihat laporan dari BPK. BPK sudah mengindikasikan adanya BMN yang tidak digunakan (BMN *idle*). Yang akhirnya merekomendasikan kepada Pengelola BMN untuk melakukan pengelolaan lebih serius tentang BMN *idle* ini.

Secara regulasi memang disadari bahwa PMK No 96/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN belum mengatur secara khusus mengenai tata cara pengelolaan BMN *idle*. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sekarang ini banyak K/L yang membutuhkan BMN, contohnya Komnas HAM, Badan Standarisasi Nasional dan KPK. Perlu diketahui, sebenarnya KPK mendapat gedung dari DJKN yang merupakan eks pengelolaan BPPN, namun karena kapasitasnya sudah



BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi K/L (BMN *idle*) wajib diserahkan kepada Pengelola BMN

tidak muat maka perlu gedung yang lebih luas.

Pada sisi yang lain, ada K/L yang memiliki BMN yang berlebih. Contoh paling dekat adalah ketika KPKNL di Serpong dan beberapa KPKNL lain masih menyewa, tetapi ada satu K/L yang juga di daerah Serpong mempunyai tanah yang luas sekali.

Jadi, atas dasar berbagai latar belakang dan pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan KMK Nomor: 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L kepada Pejabat di lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

Sebagai pedoman lebih teknis tentang prosedur kerja pengelolaan BMN *Idle* maka diterbitkan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor: Per-5/KN/2012 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat dalam Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L. Tujuannya, sesuai dengan di konsideran PMK 250/PMK.06/2011 untuk penggunaan BMN yang efektif, efisien, dan optimal.

Kriteria BMN *Idle*

BMN dapat dikategorikan *idle* jika memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan PMK Nomor: 250/PMK.06/2011 di pasal 3, dinyatakan bahwa BMN dapat dikategorikan *idle* dengan kriteria meliputi : a) BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas K/L; atau b) BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas K/L.

Tetapi ada pengecualian, tidak dikategorikan sebagai BMN *idle* apabila: a) BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh K/L yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga; atau b) BMN

telah direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua, terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN *idle*.

Jadi, diberikan waktu kepada K/L untuk merencanakan penggunaan BMN sejak ditetapkan sebagai BMN *idle*. Ini karena dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah *mindset* K/L, yang beranggapan bahwa BMN itu miliknya, padahal K/L hanya menggunakan saja. Contohnya dalam suatu K/L, ada aset yang akan digunakan oleh K/L lain untuk tujuan masyarakat umum, K/L tersebut bersedia melepaskan tetapi minta ganti rugi dalam bentuk tanah lagi (misal), jadinya seperti tukar menukar. Padahal berdasarkan PP 6/2006 dan PMK 96 Tahun 2007, kewajiban untuk sertifikasi tanah adalah atas nama Pemerintah RI, namun agar harmonis dengan peraturan pemerintah di bidang pendaftaran tanah, akhirnya sertifikat itu atas nama Pemerintah RI c.q K/L.

Menurut Bapak Dedi Syarif Usman, memang kita berbeda dengan negara lain seperti Jepang. Jepang, negara yang tanahnya sangat langka (*scarce*), misalnya ada tanah dan gedung Kementerian A (5 lantai), sebelahnya ada tanah dan gedung kementerian B (4 lantai). Maka di Jepang, bangunan yang satu dirubuhkan dan dibangunlah gedung dengan 10 lantai untuk 2 Kementerian. Selanjutnya yang dirubuhkan tadi bisa dimanfaatkan, bisa mereka kerjasama dengan swasta menjadi kawasan distrik bisnis atau bisa untuk *public park* (taman kota), dan lain-lain. Sementara di Indonesia saat ini belum bisa. Nah kedepan mungkin menunggu satu atau dua generasi, kita akan semakin sadar akan pentingnya lahan, imbuhan pejabat karier dari DJKN ini.

Sebagai langkah awal untuk menertibkan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*, maka kriteria BMN *idle* yang harus diserahkan ke Pengelola Barang adalah untuk tanah dan/atau bangunan yang *idle* seluruhnya atau 1 nomor urut pendaftaran (NUP) tidak termasuk aset yang *idle* sebagian. Langkah ini ditempuh untuk membangun *awareness* (kesadaran).

BMN yang *idle* sebagian, kita memberikan kepercayaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mengoptimalkan BMN yang digunakannya. Berdasarkan PMK Nomor 96 Tahun 2007, sudah ada koridornya yaitu yang disebut pemanfaatan BMN. Artinya, diberikan kepercayaan kepada K/L untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dan sekarang saya kira sudah banyak. Nah itu nanti juga dicatat di Laporan Tahunan BMN, bahwa dari tahun ke tahun, permohonan pemanfaatan BMN itu semakin banyak. Jadi artinya, sekarang K/L sendiri sudah menyadari pentingnya utilisasi/pemanfaatan BMN, seperti untuk ATM, *minimarket*, atau bank, karena saat ini gaji itu kan sudah masuk lewat bank, jadi ada yang dimanfaatkan sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Intinya K/L semakin sadar terhadap pemanfaatan BMN, karena ada PNBP-nya. Walaupun nilainya tidak besar, tetap merupakan bagian kontribusi PNBP. Memang kalau dibandingkan dengan penerimaan pajak yang sudah egara Rp1.100 Triliyun, bea cukai egara Rp400 Triliyun, memang PNBP dari sisi ini belum besar, tapi daripada tidak masuk kas egara atau menganggur lebih baik diserahkan kepada egara, karena kalau disewakan ke bank paling tidak, pihak bank akan merawatnya.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depan akan dilakukan kajian ulang apabila memungkinkan untuk mengatur *idle* sebagian, sambil menunggu perkembangan pelaksanaan PMK 250 ini. Demikian tutur Direktur BMN yang ramah ini.

Kondisi BMN *Idle* hingga saat ini.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh DJKN, sampai dengan penyusunan Laporan Semester I tahun 2012, belum terdapat BMN *idle* yang diserahkan kepada Pengelola Barang, sehingga Laporan BMN *idle* per 30 juni 2012 masih nihil. Akan tetapi berdasarkan laporan dari Kanwil DJKN dan KPKNL, terdapat BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN *idle* yang siap ditindaklanjuti untuk diproses se-

suai dengan ketentuan PMK Nomor 250/PMK.06/2012.

Manfaat BMN *Idle* bagi Pengelola

Ketika ditanya tentang apa manfaat BMN *idle* bagi Pengelola BMN, Direktur BMN memberikan jawaban ringkas bhawa kalau dilihat dari sisi bisnis, setiap aset harus ada *return*-nya. Intinya kalau BMN *Idle* diserahkan kepada Pengelola, nanti Pengelola akan bisa menetapkan status penggunaan di K/L lain yang memerlukan sehingga tidak perlu belanja untuk pengadaan tanah/bangunan, bisa dimanfaatkan, kalau asetnya sudah tidak ideal lagi, bisa dijual juga. Yang jelas adalah optimalisasi BMN dan PNBPN.

Sekarang ini boleh dikatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 6%. Ya memang kalau negara berkembang, pertumbuhannya harus tinggi. Tetapi perlu diingat, salah satu *drive*-nya adalah konsumsi sehingga neraca perdagangan kita defisit. Jadi artinya, pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh konsumsi saja itu tidak sehat, mesti ada investasi. Untuk investasi ini yang dibutuhkan adalah infrastruktur. Jadi belanja modal nantinya diarahkan ke infrastruktur.



Foto: Eros L. Mursalin

Dilihat dari Sisi Bisnis, Setiap Aset Harus Ada *Return*-nya

Proses Pengelolaan BMN *Idle*

Terkait dengan proses pengelolaan BMN *idle*, Direktur BMN yang santun ini menyatakan bahwa secara garis besar pengelolaan BMN *idle* mendasarkan pada PMK Nomor: 250/PMK.06/2011 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengelola Barang menindaklanjuti informasi yang diterima mengenai BMN yang terindikasi *idle* dengan melakukan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan investigasi atas BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle* apabila Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak memberikan jawaban klarifikasi tertulis atau Pengelola Barang masih memerlukan kejelasan atas materi klarifikasi tertulis PB/KPB.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas jawaban klarifikasi tertulis dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Ba-

rang dan/atau hasil investigasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang untuk menentukan apakah BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle* tersebut adalah BMN *idle* atau bukan. Apabila BMN tersebut merupakan BMN *idle* maka Pengelola Barang menetapkan BMN *idle* dalam bentuk keputusan Pengelola Barang dan disampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang. Apabila BMN tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai BMN *idle*, diberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal surat penyampaian keputusan BMN *idle*. BMN *idle* yang diterima penyerahannya adalah yang *free and clear*. Untuk BMN *idle* yang masih terdapat permasalahan hukum, Pengguna Barang harus

menyelesaikannya terlebih dahulu.

Pengguna barang menghapus BMN *idle* tersebut dari DBP berdasarkan SK penetapan BMN *idle* dan berita acara serah terima BMN *idle* dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang yang akan menggunakan BMN *idle* yang sudah ada di Pengelola Barang, mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan BMN *idle* dan mengeluarkan surat persetujuan/penolakan penggunaan BMN *idle*. Pengelola Barang menyerahkan BMN *idle* kepada Pengguna Barang berdasarkan surat persetujuan Pengelola Barang dimaksud yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Berdasarkan BAST tersebut, Pengelola Barang mengeluarkan SK

penghapusan dan menghapus BMN *idle* tersebut dari Daftar BMN berupa tanah dan/atau bangunan *idle*.

Tindak lanjut Pengelolaan BMN *Idle*

Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan BMN *idle* telah ada, lalu apa yang akan dilakukan DJKN ke depan? Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan BMN *idle*, beberapa hal dilakukan oleh DJKN. Pertama, edukasi kepada *stakeholders* DJKN. Saat ini DJKN bekerjasama dengan Biro KLI di Setjen, dan melibatkan Forkem (Forum Wartawan Keuangan). Harapannya dengan kerjasama ini edukasi kepada publik, kepada K/L akan lebih banyak tersampaikan sehingga ada peluang untuk membantu pemerintah untuk menertibkan aset.

Upaya dukungan dari regulasi juga terus dilakukan, salah satunya dengan menyusun PMK tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian BMN. Saat ini, RPKM sudah disusun dan sekarang sedang diharmonisasikan di Setjen, mudah-mudahan November atau Desember itu sudah lahir PMK tentang Tata Cara Pengawasan Pengendalian BMN.

Upaya lainnya yaitu berencana menggandeng BPK juga untuk sosialisasi ulang kepada K/L, sehingga dapat dilakukan penertiban BMN seperti dulu ketika awal-awal melakukan penertiban rekening liar. Tetapi saya kira itu adalah opsi paling terakhir, saat ini kita lebih memilih untuk sosialisasi, membangun *awareness*, dan bekerjasama dengan BPK. Ada juga yang pernah berpendapat untuk menggandeng KPK, Itjen pada K/L namun itu akan kita kaji dulu lebih seksama, yang jelas pendekatan *soft* lebih kita kedepankan.

Pengembangan SDM juga kita lakukan. Khususnya bagi pegawai DJKN telah dilakukan beberapa upaya pembekalan untuk penyiapan tenaga yang nantinya akan menangani pengelolaan BMN *Idle* ini. Kegiatan tersebut diantaranya :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis bagi para petugas yang menangani pengelolaan BMN pada Pengguna Barang sebanyak 3 tahap yaitu pada

tahap 1 tanggal 12 – 13 Juni 2012, tahap 2 tanggal 19 – 20 Juni 2012, dan tahap 3 tanggal 26 – 27 Juni 2012;

- b. Melakukan sosialisasi PMK 250/2011 kepada seluruh K/L pada tanggal 19 September 2012;
- c. Melakukan sosialisasi PMK 250/2011 kepada seluruh Kanwil DJKN melalui teleconference pada tanggal 22 Oktober 2012;
- d. Menugaskan para pengelola BMN di tingkat KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat untuk mengikuti DTSS Perencanaan Kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK. Dalam DTSS ini, salah satu materi yang disampaikan adalah tentang tata cara pengelolaan BMN *idle*;
- e. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Bidang PKN di Kanwil DJKN dan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di seluruh KPKNL dalam acara Rakertas Pengelola BMN yang akan dilaksanakan tgl 28-30 November 2012.

Permasalahan Hukum

Dalam kenyataan bahwa terdapat BMN yang *idle*, namun tidak dapat diserahkan kepada Pengelola karena atas BMN tersebut sedang mengalami masalah hukum. PMK 250/PMK.06/2011 menyatakan bahwa BMN *idle* yang diserahkan kepada Pengelola harus sudah tidak memiliki permasalahan hukum dan lain-lainnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur BMN memaparkan apabila Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah putus dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai pihak yang kalah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud. Inilah fasilitas pembinaan hukum yang dapat diberikan oleh Pengelola (DJKN).

Sanksi

DJKN dengan segala perangkat peraturan perundang-undangan yang dimiliki terus berupaya untuk melakukan penertiban atas BMN *idle*. Apabila ada BMN yang diindikasikan *idle* berdasar-

kan informasi yang masuk ke Pengelola, maka segera dilakukan langkah-langkah mulai dari klarifikasi tertulis hingga melakukan investigasi.

Dari hasil investigasi atau klarifikasi tertulis, kita nanti mereview dan hasilnya bisa ada dua:

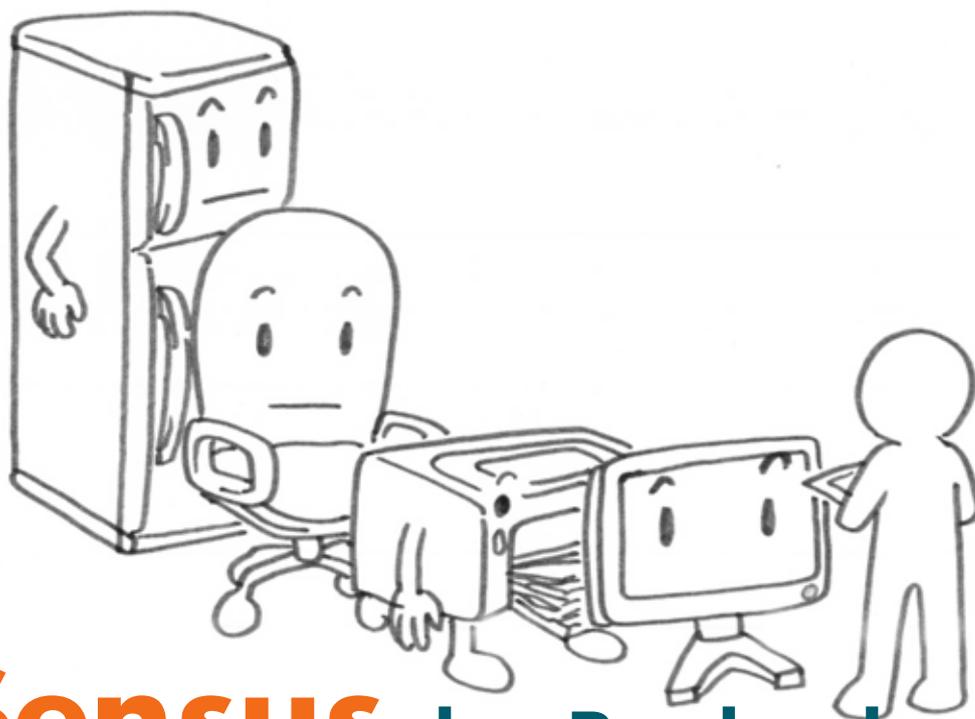
- a. BMN dinyatakan tidak *idle*;
- b. BMN dinyatakan *idle*. Apabila dinyatakan sebagai BMN *idle*, paling lambat 1 bulan setelah keputusan penetapan BMN *idle*, itu K/L wajib menyerahkan BMN kepada pengelola.

Bagi Pengguna barang yang tidak menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* dapat dikenakan sanksi berupa: 1) Pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* dan 2) Penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh pengguna barang. Namun intinya DJKN akan tetap mengedepankan upaya penyelesaian secara baik bukan kepada sanksi.

Harapan

Di akhir wawancara, Direktur BMN menyampaikan harapan terkait dengan pengelolaan BMN *idle* bahwa seluruh jajaran DJKN, khususnya Direktorat BMN, menginginkan seluruh BMN itu digunakan untuk melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan optimal. Apabila ada yang digunakan tidak sesuai dengan tugas, harapan kami bisa diserahkan kepada Pengelola. Nantinya, Pengelola akan mengoptimalkan, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh K/L yang perlu, bisa juga dijual kalau memang itu lebih menguntungkan dijual. Harapan kami ke depannya juga karena tanah di Indonesia ini makin langka, bisa mungkin nanti dua K/L dapat menempati satu gedung secara bersamaan. Tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Semoga pengelolaan BMN *idle* ini dapat berjalan dengan baik demi kebaikan kita semua.[ts]

Ilustrasi: V.M.I. Bimo Adi



Sensus dan Pemberdayaan Sanksi

(dalam Mengefektifkan Pengelolaan BMN *Idle*)

OLEH: RAHMAT GUNTORO

D Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak lepas dari persoalan adanya BMN yang berkategori *idle*, yaitu BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Berbicara BMN *idle*, terdapat dua hal penting yaitu BMN yang dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dan BMN tersebut tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tu-

gas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Tulisan ini akan berangkat dari dua hal penting tersebut yang berfokus pada langkah mengefektifkan pengelolaan BMN *idle* dengan sensus dan pemberdayaan sanksi.

Pemilihan kosa kata sensus dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan sangat mendesak dan pentingnya sebuah *action* untuk menghasilkan database yang bersifat holistik tentang dua

hal penting terkait BMN *idle* diatas, yaitu BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dan penggunaan BMN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Sensus ini lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan inventarisasi BMN yang telah dilakukan, karena fokus pada dua hal penting tadi meskipun memiliki kesamaan karakteristik dalam hal proses menyeluruh terhadap asset. Perbedaanya,

sensus khusus untuk tanah dan/atau bangunan saja, sedangkan inventarisasi untuk obyek yang lebih luas.

Pada saat ini berapa jumlah, nilai, luas tanah dan /atau bangunan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga itu bisa diperoleh dari data yang sudah *existing*. Sedangkan sensus ini akan menghasilkan database yang berbeda yaitu tentang hubungan dua hal penting diatas, tentang obyek tanah dan/atau bangunan dan apakah penggunaan obyek tersebut untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menentukan hubungan ini perlu banyak hal yang digunakan sebagai data pendukung antara lain kriteria aset *idle*, bentuk pengamanan aset, administrasi yang akan menjadi penentu *action* yang akan diambil Kementerian Keuangan sebagai regulator dan eksekutor.

Setelah proses sensus, akan diketahui apakah dua hubungan tadi diperoleh atau tidak. Data yang menunjukkan hubungan ini diperlukan untuk menentukan *action* berikutnya termasuk salah satunya terkait dengan pemberdayaan sanksi. Beberapa pihak terkait yang memungkinkan untuk terlibat adalah auditor internal dan eksternal pemerintah, Pengguna BMN, Pengelola BMN, pemegang kewenangan pemberian sanksi terkait pengelolaan BMN yang *idle*. Melihat kondisi yang tergambar diatas, adalah suatu hal penting dalam pengelolaan BMN yang *idle* bila berbicara pemberdayaan sanksi dan bagaimana agar sanksi memiliki kekuatan.

BMN *Idle*

Sebelum melangkah tentang BMN *idle*, perlu untuk mengupas penyelesaian pekerjaan yang tersisa terkait penertiban BMN, meskipun bahasan saat ini adalah bagian dari upaya penertiban BMN. Adapun beberapa pekerjaan rumah yang masih tersisa dan harus diselesaikan terkait tanah dan/atau bangunan antara lain:

1. BMN berupa tanah yang tidak ditemukan;
2. BMN berupa tanah yang Berada dalam penguasaan Kementerian Negara/Lembaga namun belum bersertipikat atas nama Kementerian Negara/Lembaga;
3. BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan Kementerian Negara/Lembaga namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan;
4. BMN dikuasai oleh pihak lain;
5. BMN dalam sengketa;
6. BMN dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi;
7. Gedung berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis;

Pekerjaan rumah tersebut bukanlah sederhana, perlu fokus, sinergi antar pihak dalam penyelesaiannya.

Kriteria suatu BMN bisa dikategorikan *idle*, untuk membuat kategori ini diperlukan suatu kriteria yang terukur, antara lain:

1. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan

- fungsi Kementerian/Lembaga; atau
2. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan amanat undang-undang, kekuasaan pengelolaan BMN berada pada Kementerian Keuangan. Kekuasaan dalam bidang ini akan menjadi momentum besar untuk tampil sebagai *leader* dalam menggawangi pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel dan memiliki kemanfaatan tepat untuk negara. Momentum emas ini sangat disayangkan jika sampai lepas, terlebih beberapa catatan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BMN masih hangat untuk dibicarakan.

Pengecualian dari dua kriteria diatas yang merupakan bagian dari fleksibilitas aturan terkait dengan BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1. BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN *idle*;
2. BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua, terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN *idle*.

Sensus Lebih Bersifat Khusus Jika Dibandingkan dengan Inventarisasi BMN yang Telah Dilakukan



Sumber: heavytrucktax.blogspot.com

Dalam pengecualian ini juga ada catatan yang penting untuk keberhasilan bersama di bidang pengelolaan BMN dan menjadi suatu ketegasan dalam pengukuran tindakan yaitu “bagaimana indikasi suatu BMN yang *idle* terukur dengan baik?” Sekali lagi, ini adalah momentum emas untuk menjadi *leader* di bidang keuangan negara.

Kewenangan yang diamanatkan undang-undang kepada Menteri Keuangan dalam kaitan pengelolaan BMN *idle*, meliputi :

1. Meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. melakukan investigasi terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*;
3. melakukan penelitian terhadap informasi dan klarifikasi tertulis Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
4. menetapkan BMN sebagai BMN *idle*;

5. melakukan pengecekan administratif dan pengecekan fisik atas BMN *idle* yang akan diserahkan oleh Pengguna Barang;
6. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Pengguna Barang;
7. melakukan penatausahaan BMN *idle*;
8. melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN *idle* yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang;
9. menyusun dan mengelola anggaran pengamanan dan pemeliharaan atas BMN *idle*;
10. melakukan penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemin-dahtanganan atas BMN *idle*;
11. melakukan Penghapusan BMN *idle*.

Mencermati kewenangan tersebut diatas, Menteri Keuangan berwenang melakukan tindakan bersifat keluar, kedalam dan koordinatif. Tindakan yang diambil oleh pemilik kewenangan di-

dasarkan oleh informasi dari manapun yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber informasi ini berasal dari:

1. Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang;
2. Laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
3. Hasil penertiban Barang Milik Negara;
4. Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;
5. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dari Kementerian/Lembaga;
6. Laporan hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah;
7. Informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau
8. Laporan masyarakat.

Sensus BMN *idle*

Sebelum berbicara tentang metode sensus dan sampling sebagai metode pembeda, terlebih dahulu perlu mengupas apa yang menjadi pijakan Pengelola BMN dalam melakukan sensus BMN *idle* dan apa manfaat hasil sensus. Berangkat dari kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pengelola BMN yang dalam hal ini didelegasikan pada direktorat jenderal dibawahnya, Menteri memiliki kewenangan yang luas cakupannya dalam pengelolaan BMN dari perencanaan BMN hingga penghapusan. Berdasarkan kewenangan itulah, langkah sensus BMN *idle* dijalankan.

Metode sensus adalah metode pengumpulan data dimana seluruh populasi diselidiki tanpa terkecuali, sedangkan metode *sampling* adalah metode pengumpulan data dimana hanya sebagian dari populasi yang diselidiki. Beberapa kunci sukses dalam sensus BMN *idle* ini antara lain:

1. Pelaksanaan yang menyeluruh dan detail untuk menghasilkan data dengan akurasi tinggi sehingga menghasilkan informasi terbaik bagi pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat pengelolaan BMN *Idle*. Pelaksanaan ini perlu dilaksanakan *step by step* melalui langkah awal berupa proyek percontohan pada satu atau beberapa

Sensus BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Efektifitas Pengelolaan BMN *Idle* Membawa Dampak Ikutan yang Positif dengan Mendukung Terciptanya Pangkalan Data BMN yang Akurat dan Menyeluruh

- kementerian/lembaga tertentu terlebih dahulu;
2. Memanfaatkan data dari hasil penertiban BMN dan mengembangkannya dengan fokus pada kriteria BMN *idle*. Mengapa perlu fokus pada BMN *idle*? Karena sensus ini akan menghasilkan informasi yang menghubungkan kriteria BMN *idle* dan jenis BMN tanah dan/atau bangunan sehingga sensus yang dilakukan ini berbeda tujuan utamanya dengan inventarisasi BMN walaupun dalam satu payung penertiban BMN;
 3. Berorientasi pada tujuan utama yaitu dalam rangka pengelolaan BMN yang efektif, dengan harapan langkah sensus BMN *idle* dapat menjadi jembatan dalam menuju efektifitas pengelolaan BMN.

Beberapa hal yang dapat diperoleh dari hasil sensus BMN *idle* antara lain:

1. Informasi indikasi BMN *idle*;
2. Informasi terkait proses tindak lanjut penertiban BMN;
3. Informasi terkait pengamanan BMN;
4. Informasi terkait pengendalian BMN;
5. Informasi kesesuaian penggunaan BMN dengan standar kebutuhan;
6. Informasi kesesuaian pemanfaatan BMN dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
7. Mendukung terciptanya pangkalan data BMN yang akurat untuk pihak pengelola;
8. Memperoleh informasi indikasi kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari setiap kementerian/lembaga;

9. Informasi dalam proses perencanaan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Dari uraian diatas, sensus terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka efektifitas pengelolaan BMN *idle* membawa dampak ikutan yang positif dengan mendukung terciptanya pangkalan data BMN yang akurat dan menyeluruh, sehingga pada masa yang akan datang informasi terkait pemenuhan atas kebutuhan BMN dapat diketahui secara langsung oleh semua pemangku kepentingan dengan didukung oleh fasilitas teknologi informasi.

Pengamanan BMN

Sensus yang dilakukan dalam rangka efektifitas pengelolaan BMN *idle* terkait dengan pengamanan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, beberapa diantaranya antara lain:

1. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. Data hasil sensus yang berfokus melihat hubungan BMN tanah dan/atau bangunan dengan kriteria BMN *idle*, ada kemungkinan akan mendapatkan data dengan kondisi tanah yang belum bersertifikat atau telah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah R.I cq. Kementerian/Lembaga.

Tujuan dari pensertifikatan BMN berupa tanah yang antara lain:

- memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah;

- memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah;
- melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah; dan
- mengamankan BMN berupa tanah.

2. Selain dalam hal BMN berupa tanah, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Rumah Negara, antara lain:

- menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara;
- memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan
- melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara.

Perencanaan, Standarisasi Kebutuhan BMN dan Pemberdayaan Sanksi

Satu hal lagi yang membawa manfaat positif sensus BMN adalah dalam hal perencanaan dan standarisasi kebutuhan BMN. Mari kita liat beberapa hal yang terkait dengan perencanaan BMN yang memiliki pengertian sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan da-

tang. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang yang secara fungsional dilakukan oleh Ditjen KN memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui RKBMN dan RKTBMN. Bila dilihat ruang lingkup perencanaan BMN yang terdiri dari:

- Perencanaan Pengadaan BMN;
- Perencanaan Pemeliharaan BMN;
- Perencanaan Pemanfaatan BMN;
- Perencanaan Pemindahtanganan BMN; dan
- Perencanaan Penghapusan BMN.

Obyek BMN yang terkait perencanaan salah satunya adalah tanah dan/ atau bangunan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN *idle*. Perencanaan BMN yang dilakukan oleh Pengguna BMN terdiri dari Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan Rencana Kebutuhan Tahunan BMN (RKTBMN) yang berpedoman pada Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga selain itu juga berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang ditetapkan oleh Pengelola BMN. Yang dimaksud dengan Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga, sedangkan Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.

Dalam kapasitasnya sebagai Pengelola Barang, Menteri Keuangan dapat menolak sebagian dan/ atau seluruh RK-

BMN, RKTBMN dalam hal:

1. tersedianya BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
2. tersedianya BMN *idle* pada Pengelola Barang; atau
3. berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang masih mencukupi kebutuhan Pengguna Barang.

Perberdayaan Sanksi

Dalam kaitan pemberdayaan sanksi, Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* dapat dikenakan sanksi berupa:

1. pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle*;
2. penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan BMN *idle*, dua sanksi diatas lebih pada penekanan bila BMN telah ditetapkan *idle* oleh Pengelola BMN. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan BMN *idle* kaitannya dalam pemberian sanksi:

1. Ada baiknya, pemberian sanksi dimulai dengan tindakan yang bersifat preventif yaitu sebelum BMN ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh

Pengelola BMN;

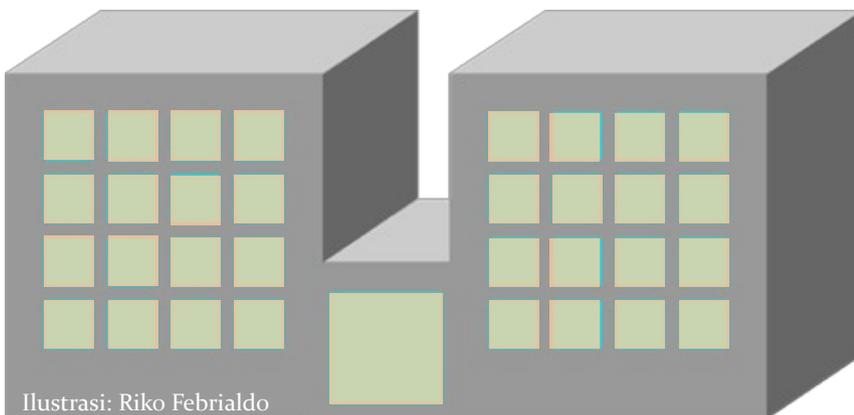
2. Diberikan tindakan sanksi yang bersifat bertingkat dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, lama melakukan kesalahan, bentuk kesalahan dan hal-hal lain yang dapat dijadikan pemeringkatan.

Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMN dan RKTBMN dalam perencanaan BMN, dapat dikenakan sanksi berupa:

- rekomendasi dari Pengelola Barang untuk dilakukannya pembekuan atas dana pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Selain itu, penenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKTBMN dapat pula diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi dari Pengelola Barang kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk tidak mengalokasikan dana pengelolaan BMN di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengguna Barang yang bersangkutan.

Maka dengan demikian berdasarkan beberapa uraian diatas, sensus BMN dan pemberdayaan sanksi oleh Pengelola BMN dalam rangka efektifitas pengelolaan BMN berkaitan erat dengan langkah penertiban BMN *idle*. Semoga saja langkah besar Menteri Keuangan selaku pengelola aset negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membawa arus perubahan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang mampu mengelola asetnya dengan efektif, efisien, akuntabel dan bermanfaat bagi rakyatnya, bahkan harapan besar kita semua untuk bisa tampil sebagai acuan bagi negara lain.



Ilustrasi: Riko Febrialdo

*Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang



Ilustrasi: V.M.I. Bimo Adi

MENJARING BMN IDLE

OLEH: TANDA SETIYA



Semua pihak terkait harus bekerjasama untuk optimalisasi pengelolaan BMN idle. Sudah menjadi tekat bersama bahwa BMN harus dikelola dengan baik demi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan strategi manajemen aset yang telah dicanangkan oleh Pengelola BMN (DJKN) bahwa pengelolaan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada penerimaan Negara, bukan malah sebaliknya yang selalu menggerogoti dana APBN.

Mengingat kondisi tersebut maka, pengelolaan BMN *idle* harus segera dibenahi agar, BMN benar-benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tidak

boleh ada BMN yang dibiarkan menganggur terlantar tanpa memberikan manfaat sedikitpun bagi negara. Setiap aset yang ada harus digunakan seoptimal mungkin. Untuk itu perlu dilakukan penjarangan BMN mana yang benar-benar *idle*, sehingga kedepannya dapat dikelola dengan lebih memanfaatkan.

Semangat untuk mengelola BMN *idle* sebenarnya telah diamanahkan oleh PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo-

laan BMN/BMD. Namun hingga tahun 2012, belum ada satupun transaksi BMN *idle* terjadi. Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN tidak tinggal diam, buktinya lahir PMK 250/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk Tugas dan Fungsi K/L. Bahkan di tahun 2012, secara lebih teknis lagi telah ditetapkan prosedur dan pelepasan kewenangan kepada instansi vertikal DJKN untuk melakukan pengelolaan BMN *idle* ini. Sekali lagi usaha ini masih belum menunjukkan hasil yang nyata.

Dengan latar belakang dan kondisi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih akseleratif dan variatif. Langkah akseleratif dari segi regulasi telah dilakukan oleh DJKN dengan lahirnya PMK, KMK hingga Peraturan Dirjen yang berisi tatacara/prosedur pengelolaan BMN *idle*. Bahkan dalam waktu dekat akan lahir lagi PMK tentang Pengawasan

dan Pengendalian BMN yang dapat dijadikan sebagai instrument pendukung dalam upaya penjarangan BMN *idle*.

Artikel ini lebih menonjolkan bahasan tentang langkah variatif secara structural/institusional yang terlibat dalam penjarangan BMN *idle*. Upaya ini sebenarnya sudah diakomodir oleh PMK BMN *idle* dimana dinyatakan bahwa informasi tentang BMN *Idle* dapat diperoleh dari : 1) hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang; 2) Laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 3) hasil penertiban Barang Milik Negara; 4) Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan; 5) Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dari Kementerian/Lembaga; 6) laporan hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah; 7) informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau 8) laporan masyarakat.

Dari kedelapan sumber informasi adanya indikasi BMN *idle* tersebut dapat ditarik institusi yang mewakilinya yaitu : 1) DJKN/Kanwil/KPKNL; 2) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang (K/L, Satker); 3) BPK/Itjen; 4) Media Masa; 5) Masyarakat. Kelima institusi tersebut apabila dapat bekerja secara sinergi maka akan terjaring BMN *idle* lebih cepat.

Institusi Pengelola sebenarnya telah berupaya dengan mengadakan sosialisasi, inventarisasi dan beberapa aktivitas lainnya, namun harus diakui bahwa hasilnya masih sebatas pada catatan indikasi. Demikian juga dengan Pengguna/Kuasa pengguna Barang, hingga saat ini kesadaran untuk menyerahkan BMN *Idle* masih rendah bahkan bisa dibilang belum ada sama sekali.

Institusi pemeriksa baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, dapat dijadikan tumpuan untuk menjarang BMN *Idle*. Sudah lumrah apabila rekomendasi temuan yang disampaikan oleh lembaga pemeriksa/pengawas akan lebih direspon positif oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang daripada yang

dilakukan oleh Pengelola BMN. Untuk itu upaya penjarangan BMN *Idle* dengan lebih menggalakkan peran dari institusi pengawas harus terus ditingkatkan. Upaya menjalin kerjasama dengan institusi pengawas dengan penyamaan pemahaman dan upaya penjarangan BMN *Idle* maka langkah ini akan berdampak positif.

Upaya sosialisasi bahkan hingga membuat MOU terkait penjarangan BMN yang diindikasikan *idle* antara Pengelola dan Pengawas akan menjadi lebih efektif tentunya. Apalagi saat ini audit yang dilakukan oleh aparat pengawas sudah mulai mengarah kepada audit aset. Maklum laporan keuangan yang disusun oleh K/L sudah dapat dibilang sangat baik, sehingga upaya pelebaran arah audit perlu dilakukan. Hal ini terbukti bahwa rekomendasi temuan audit akhir-akhir ini mulai mengarah kepada pengelolaan aset.

Kerjasama yang paling memung-

Pengelola BMN (DJKN) kiranya perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi yang terkait

kinkan adalah kerjasama dengan BPK sebagai eksternal audit. Bagi Pengelola kerjasama dengan BPK kiranya dapat dijadikan alternative jitu untuk menjarang BMN *idle*. Namun kerjasama dengan pengawas internal pemerintah bukan berarti tidak perlu dijalin. Upaya kerjasama dengan Itjen pada masing-masing K/L juga dapat dijadikan alternatif diversifikasi penjarangan BMN *idle*.

Upaya lebih ekstrim misalnya menjarang kerjasama dengan KPK, sebenarnya dapat juga dilakukan. Misalnya dengan Divisi Pencegahan, agar apabila ada BMN yang terindikasikan *idle* KPK dapat melakukan pengingat kepada K/L yang bersangkutan. Walau upaya ini hasilnya masih belum tentu menjanjikan mengingat perkara yang terindikasikan korupsi pun belum semuanya dapat dituntaskan oleh KPK.

Bekerjasama dengan media massa untuk sosialisasi dan informasi tentang

adanya BMN *idle* dapat ditempuh juga. Upaya memasang iklan baik di media cetak maupun elektronik tentu dapat dijadikan media untuk penyadaran dalam rangka optimalisasi BMN *idle*. Beberapa acara TV yang sifatnya investigatif dapat dijadikan media kerjasama dengan menyajikan informasi investigatif tentang BMN yang diindikasikan *idle*. Tentu dengan biaya yang lebih murah media cetak surat kabar dan online dapat juga dijadikan cara untuk menjarang BMN *idle*. Dengan memberikan pemahaman kepada awak media tentang BMN *idle*, maka informasi BMN *idle* akan menjadi bagian dari sumber tulisan bagi para kuli tinta tersebut. Dan hasilnya semua itu dapat menstimulus terjaringnya BMN *idle*.

Upaya institusional dengan melibatkan masyarakat sebenarnya memiliki jangkauan jaringan yang sangat luas. Namun kondisi masyarakat yang belum *awareness* terhadap BMN *idle* tentu menjadi tembok tebal yang harus dijebol.

Memang tidak mudah, namun upaya dengan memberikan sosialisasi melalui media dan berbagai cara dapat dilaku-

kan agar semakin banyak masyarakat yang lebih peduli dengan optimalisasi BMN *idle*. Memasang iklan informasi masyarakat misalnya dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti masyarakat dapat dijadikan pilihan. Misalnya dengan tulisan selamatkan BMN *idle*, Laporkan apabila ada BMN yang terlantar dan lain-lainnya.

Pengelola BMN (DJKN) kiranya perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi yang terkait dengan penjarangan BMN *idle* tersebut. Dari beberapa institusi yang telah dibahas diatas paling memungkinkan akan berkontribusi besar adalah aparat pengawas baik eksternal maupun interna pemerintah, media masa dan masyarakat. Apabila upaya ini dapat segera dilakukan maka penjarangan BMN *idle* akan dapat segera terwujud.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Wisuda SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2012

OLEH: TIM LIPUTAN

“Milikilah Karakter yang Kuat sehingga Saudara Betul-Betul Menjadi Bagian Masyarakat yang Memberikan Manfaat”

- Menteri Keuangan

Pada tahun 2012 ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berhasil mewisuda sebanyak 3.546 lulusan. Wisuda dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC). Diawali dengan prosesi seluruh wisudawan, lalu para wisudawan terbaik didampingi para wali wisudawan memasuki ruang sidang terbuka. Senat STAN yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kamil Sjoeib, memasuki ruang sidang terbuka, disusul oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin, beserta rom-



Foto: Eros L. Mursalin

bongan, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sonny Loho, serta perwakilan dari unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), memasuki ruang sidang.

Pagi itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mewakili Menteri Keuangan, menghadiri prosesi wisuda atas 3.546 wisudawan dari program Diploma IV, III dan I Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pada saat ini, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menyelenggarakan 3 (tiga) jenis program yaitu:

- Pertama, program reguler, meliputi

Program Diploma I dan Program Diploma III Keuangan yang mahasiswanya berasal dari lulusan SLTA.

- Kedua, program tugas belajar, meliputi Program Diploma III Keuangan yang mahasiswanya berasal dari lulusan program Diploma I, dan Program Diploma IV Keuangan yang mahasiswanya berasal dari lulusan Program Diploma III Keuangan STAN yang telah menjadi PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- Ketiga, program kerja sama pendidikan dengan dengan Kementerian/Lembaga lainnya serta Pemerintah Daerah dalam rangka membantu *capacity building* SDM aparatur Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa nantinya lulusan STAN ini akan ditempatkan di berbagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tenaga pengelola keuangan negara.

Kepala BPPK, Kamil Sjoeb, dalam laporan pelaksanaan wisuda STAN menyampaikan jumlah lulusan STAN yang diwisuda dalam tahun ini. Dari total 3.456 wisudawan, sebanyak 209 wisudawan berasal dari lulusan Program Diploma (Prodip) III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara, 427 dari lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Perpajakan, 100 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Penilai/Pajak Bumi Bangunan (PBB), 67 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai, 49 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN), 877 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi, 726 lulusan Prodip I Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai, dan 731 lulusan Prodip I Keuangan Spesialisasi Perpajakan.

Selain itu, STAN juga mewisuda 186 lulusan yang berasal dari Prodip IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, 48 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Kurikulum Khusus, 91 lu-

lusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Perpajakan Kurikulum Khusus, serta 35 lulusan Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi dari jalur kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun akademik 2011/2012 yang baru saja berakhir, mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan (lulus) dengan predikat lulusan terbaik di masing-masing program dan spesialisasinya yaitu:

- **Program Tugas Belajar**
 - Prodip IV Akuntansi : Rizky Indra Setiawan (IPK 3,64)
 - Prodip III Akuntansi : Yasika Dewanti (IPK 3,61)
 - Prodip III Pajak : Masrul Andriyanto (IPK 3,59)
- **Program Reguler**
 - Prodip III Kebendaharaan Negara : Tri Ikayanti (IPK 3,80)
 - Prodip III Pajak : Anggara Pradnya Widhiantara (IPK 3,81)
 - Prodip III Penilai/PBB : Calvin Valenzuela (IPK 3,64)
 - Prodip III Kepabeanaan dan Cukai : Putu Lingga Pratama (IPK 3,76)
 - Prodip III PPLN : Fitriana Muslikawati (IPK 3,68)
 - Prodip III Akuntansi : Hanung Aditty Aristyatama (IPK 3,82)
 - Prodip I Kepabeanaan dan Cukai : David Herudinsyah (IPK 3,83)
 - Prodip I Pajak : Wahyuddin (IPK 3,95)
- **Program Diploma III Akuntansi Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang** : Wildan Pratama Putra (IPK 3,76).

Sumber : Keterangan Pers BPPK Kementerian Keuangan

Program Diploma I yang turut mengikuti wisuda di SICC adalah lulusan yang berasal dari tempat pendidikan Jakarta dan dari 5 (lima) Balai Diklat Keuangan (BDK) yaitu Cimahi, Palembang, Pontianak, Pekanbaru, dan Manado. Adapun



Foto: Eros L. Mursalin

lulusan Prodi I lainnya sebanyak 530 orang akan mengikuti wisuda di Balai Diklat Keuangan di daerah sebagai berikut:

- Di BDK Yogyakarta pada 17 Oktober 2012, untuk lulusan dari BDK Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan, sebanyak 323 orang;
- Di BDK Denpasar pada 18 Oktober 2012, untuk lulusan dari BDK Denpasar sebanyak 90 orang; dan
- Di BDK Medan pada 23 Oktober 2012 untuk lulusan dari BDK Medan sebanyak 117 orang

Untuk lulusan yang berasal dari program Tugas Belajar, yaitu Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV, telah kembali ke unit asal masing-masing. Sedangkan untuk lulusan dari program reguler telah diserahkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

STAN juga melakukan pendidikan untuk mahasiswa yang melalui penerimaan khusus untuk putra-putri Indonesia Bagian Timur, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, NTB dan Maluku yang terdiri dari Prodi I Kepabeanaan dan Cukai, dan Prodi I Pajak. Jumlah mahasiswa tersebut adalah sebanyak 113 orang yang masih mengikuti pendidikan di Balai Diklat Malang dan akan menyelesaikan pendidi-

kan mereka pada bulan Desember 2012. Lulusan program tersebut nantinya juga akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Kepala BPPK, dalam laporan yang dibacakan, menyampaikan harapan beliau kepada seluruh wisudawan. “Harapan saya adalah di mana pun nanti Saudara bekerja dan ditempatkan, saudara harus tetap menjaga nama baik dan kehormatan almamater ini”, ujar beliau. Kepala BPPK mengingatkan para wisudawan tentang dua hal, yaitu bahwa keberhasilan para wisudawan dalam menyelesaikan pendidikan tidak lepas dari jerih payah, dukungan dan perjuangan keluarga, khususnya orangtua dan wali. Selain itu, bimbingan yang sungguh-sungguh dan ikhlas dari para pengajar/dosen atau para guru sangatlah mempengaruhi keberhasilan mereka hingga menjadi wisudawan. Kepala BPPK juga mengajak para wisudawan untuk terus belajar. “Wisuda ini memang menandai selesainya pendidikan saudara, namun bukan berarti tugas saudara untuk belajar telah berakhir”, tegas beliau. Belajar merupakan syarat untuk menjadi lebih baik, karena selalu ada hal-hal baru untuk dipelajari. Belajar adalah pekerjaan sepanjang hayat, terutama di dalam lingkungan yang terus dilingkupi tantangan

baru.

Setelah membacakan laporannya, Kepala BPPK memohon Menteri Keuangan yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin, berkenan untuk memberikan kata sambutan atau arahan kepada seluruh wisudawan. Menteri Keuangan berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti Rapat Tahunan IMF dan Bank Dunia di Tokyo, Jepang.

Dalam sambutannya, Kiagus Ahmad Badaruddin, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan permohonan maaf Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, atas ketidakhadirannya. Lebih lanjut, dalam kata sambutan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Menkeu menyampaikan bahwa wisuda ini menandai permulaan siklus baru dalam hal pendidikan. Beliau mengajak seluruh wisudawan sebagai manusia Indonesia, untuk tidak mudah menyerah atau cengeng, atau mudah puas dan nyaman dengan apa yang sudah dicapai. “Jadilah insan-insan yang terus berusaha mencapai yang terbaik. Saudara-saudara harus menjadi orang-orang yang berkualitas: mempunyai motivasi, integritas, komitmen, disiplin, dan daya juang yang tinggi. Berusaha mencapai yang terbaik dan tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapai”, imbuah beliau.

Menteri Keuangan menyampaikan harapannya jikalau kelak terjun di dunia kerja, para wisudawan memiliki karakter yang berintegritas dan motivasi tinggi untuk menjadi manfaat. “Milikilah karakter yang kuat sehingga saudara betul-betul menjadi bagian masyarakat yang memberikan manfaat, bukan menjadi beban, bagi negara dan bangsa”, kutip beliau. Menteri Keuangan dalam sambutan tersebut juga berharap agar para wisudawan kelak memiliki “hati” dan rasa patriotisme, “Dalam bekerja, penting sekali bagi saudara untuk punya “hati” dan rasa patriotisme. Kalau saudara tidak mempunyai rasa patriotisme dalam diri untuk mewujudkan visi Kementerian keuangan, jangan pernah berpikir untuk menjadi bagian dari Kementerian Keuangan”, imbuah beliau. Menkeu secara tegas menyatakan

bahwa Kementerian Keuangan tidak akan menolerir segala tindakan yang tidak terpuji, tidak jujur, tidak punya integritas, dan tidak punya disiplin."Sekali lagi saya tekankan, milikilah karakter yang kuat sehingga saudara betul-betul menjadi bagian masyarakat yang memberikan manfaat, bukan menjadi beban, bagi negara dan bangsa", beliau sampaikan di depan seluruh wisudawan.

Kepada para wisudawan STAN, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa mereka adalah insan yang beruntung, memperoleh pendidikan gratis serta memiliki peluang tinggi untuk menjadi PNS. Beliau mendorong mereka untuk menanamkan komitmen yang kuat dalam diri untuk menjadi orang-orang dengan karakter kuat, berintegritas tinggi serta selalu berusaha memperbaiki diri untuk dapat menyumbangkan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

Setelah memberikan kata sambutan, Sekretaris Jenderal mewakili Menteri Keuangan mewisuda putra-putri terbaik STAN dengan IPK tertinggi, didampingi oleh Ketua dan Anggota Senat STAN. Acara wisuda juga diisi dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI Dr. Daeng M Nazier, MA. Beliau membawakan karya ilmiah berjudul "Pengelolaan Keuangan Negara dan SDM Aparatur Keuangan Negara".

Selanjutnya, seluruh Senat STAN secara bergantian mewisuda seluruh wisudawan yang hadir di SICC. Wajah-wajah sukacita terhampar di sepanjang acara wisuda. Pesona bahagia para orang tua dan wali yang menghantarkan anak, handi taulan dan kawan yang hadir saat itu mewarnai semaraknya seremoni wisuda STAN 2012. Hiburan lagu yang didendangkan menyemarakkan suasana, menghidupkan kegembiraan seluruh wisudawan serta undangan yang hadir. [sb]



Foto: Eros L. Mursalin

Peta Lulusan **STAN** pada Tahun 2012:

NO.	SPELIALISASI	JUMLAH LULUS
I	TUGAS BELAJAR	325
1	Prodip IV Akuntansi	186
2	Prodip III Akuntansi	48
3	Prodip III Pajak	91
II	REGULER	3.186
1	Prodip III Kebendaharaan Negara	209
2	Prodip III Pajak	427
3	Prodip III Penilai/PBB	100
4	Prodip III Kepabean & Cukai	67
5	Prodip III PPLN	49
6	Prodip III Akuntansi	877
7	Prodip I Kepabeanan & Cukai	726
8	Prodip I Pajak	731
III	KERJA SAMA	35
9	Prodip III Akuntansi (Kab. Ketapang)	35
JUMLAH		3.546

Sumber : Keterangan Pers BPPK Kementerian Keuangan

pegawai teladan Kementerian Keuangan 2011

Aris Maulana

“bekerja dengan HATI”

OLEH: TIM LIPUTAN

Sebuah tim berarti sebuah keluarga. Bekerja di dalam sebuah tim, apalagi menjadi pemimpin di dalam tim tersebut, harus lah bisa membawa tim tersebut ke dalam suasana kekeluargaan sehingga setiap elemen di dalam tim dapat bekerja dengan maksimal. Prinsip inilah yang diterapkan oleh seorang Aris Maulana dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Berikut hasil wawancara dengan Aris Maulana, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan, yang menjadi pegawai teladan Kementerian Keuangan pada tahun 2011 lalu.

Berawal dari Kuningan

Aris Maulana tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayah dari Aris Maulana adalah seorang pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Aris Maulana merupakan anak kelima dari lima bersaudara yang dididik dengan penuh kedisiplinan dan kesederhanaan. Aris Maulana

na lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 2 September 1974 dan menghabiskan masa kecilnya hingga menyelesaikan SMA di Kuningan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Aris Maulana melanjutkan pendidikan di Akademi Pelayaran di Semarang, Jawa Tengah.

Aris Maulana kecil memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tentara, karena di mata Aris tentara adalah seorang yang gagah. Saat lulus dari SMA, ternyata jalan hidup Aris membawanya ke Akademi Pelayaran. Tidak ada niatan dalam diri Aris untuk memasuki Universitas, karena menurut Aris dirinya lebih menyukai bekerja di “lapangan”. Alasan Aris memilih

Foto: Gathot Subroto





Foto: Gathot Subroto

akademi pelayaran ternyata sederhana, selain dapat bekerja di “lapangan”, alasan lainnya yaitu orang yang bersekolah di sana (Akademi Pelayaran) adalah orang yang gagah. Sama dengan alasan Aris memilih cita-cita untuk menjadi tentara.

Ada kisah menarik ketika Aris memilih jurusan yang akan dipelajarinya ketika di Akademi Pelayaran, saat itu ia ditawarkan 3 pilihan jurusan, Teknik, Tata Laksana, dan Nautika. Karena Nautika terdengar asing, maka Aris tanpa ragu memilih Nautika untuk menjadi jurusannya. Padahal saat itu Aris sama sekali tidak mengetahui di jurusan Nautika Aris akan mempelajari apa.

M a s a k u l i a h Aris dilalui tidak mudah, bu- k a n k a r e n a masalah

perkuliahan, melainkan sistem senioritas yang ada di tempatnya. Selama 2 tahun awal Aris melalui masa orientasi yang berat. Dimarahi hingga kontak fisik hal yang biasa dihadapinya. Tetapi hal ini bukannya membuat Aris muda menjadi lemah, hal ini justru membuat Aris menjadi seorang yang lebih kuat dan dewasa. Meski pernah merasakan saat-saat berat menjadi junior, tidak serta merta membuat Aris menjadi senior yang galak. Diakui oleh Aris, Aris tidak ikut-ikutan melakukan tindakan senioritas terhadap juniornya. “Berteman boleh, tapi jangan ikut-ikutan hal yang tidak baik”, tutur Aris.

Penyayang Keluarga

Awal masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pada tahun 2003. Saat itu dibuka lowongan untuk dapat bekerja pada Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Terdapat sedikit keraguan pada awalnya di dalam diri Aris Maulana untuk mencoba menjadi Pegawai Negeri Sipil, apalagi pegawai Kementerian Keuangan. Bayangan yang ada pada dirinya adalah bahwa diperlukan “uang pelicin” untuk dapat menjadi seorang pegawai negeri sipil, sedangkan ia adalah orang yang sangat anti dengan hal tersebut. Tetapi dorongan untuk mencoba rupanya lebih besar daripada rasa takut gagal. Aris dapat melalui tes demi tes hingga akhirnya lolos dan menjadi pegawai DJBC. Hal yang menjadi kekhawatirannya tidak terjadi, dan resmilah Aris Maulana menjadi pegawai DJBC.

Saat Pertama kali diterima di DJBC, Aris sangat senang. Meski bekerja di laut juga, tetapi berbeda dengan pekerjaan sebelumnya dimana Aris pernah bekerja di kapal niaga yang hanya dapat pulang sekali dalam 6 bulan, bahkan setahun mungkin baru bisa pulang sekali. Sedangkan di DJBC, Aris dapat pulang 2 minggu sekali, bahkan jikalau harus lama di lautan paling lama sebulan atau sebulan setengah saja di lautan. Diakui oleh Aris, meski menyukai lautan, Aris tidak berbakat menjadi pelaut sejati karena Aris selalu ingat keluarga meski pada saat itu belum menikah. Bahkan Aris bisa meng-

ketika sebuah tim telah menjadi sebuah keluarga, maka keberhasilan akan lebih mudah diperoleh.



habiskan uang hingga berjuta-juta hanya untuk menelepon orang tua.

Aris Maulana ditempatkan di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, Tanjung Balai Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Awal pertama bekerja sebagai CPNS di DJBC, untuk dua minggu pertama Aris dan rekan-rekannya yang lulus seleksi langsung di “gembeng” oleh para Marinir. Selama dua minggu Aris menikmati keadaan “gembengan” tersebut karena hal tersebut menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat diantara Aris dan rekan-rekannya. Setelah 5 bulan berlalu Aris mulai di tempatkan di kapal Patroli sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan jabatan mualim III. Selama jadi ABK, Aris Maulana banyak belajar dan menyerap ilmu-ilmu yang sifatnya dari para senior yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman selama di kapal patroli.

Mulai dari Menyelamatkan Orang hingga Penangkapan Penyelundup

Pada akhir tahun 2009, terjadi peristiwa tenggelamnya kapal Dumai Express 10. Aris beserta awak kapal BC 20003 ikut serta menolong penumpang kapal Dumai Express 10 di perairan Karimun. Walaupun pada saat itu Aris beserta awak kapal BC 20003 tidak dalam kondisi adanya Surat Perintah Belayar. Aris men-

ceritakan, pada saat itu hari libur, dan Aris baru pulang mengantar istrinya dari pasar. Setibanya di rumah Aris memperoleh kabar ada kapal tenggelam. Setelah menempuh perjalanan dengan cuaca yang buruk, Aris menemukan banyak orang yang terapung-apung dilautan. Ada yang sudah meninggal dan ada juga yang masih hidup. Aris beserta awak kapal langsung mengangkatnya satu persatu baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Selama Aris menjadi Nakhoda di BC 20003, Aris bersama awak kapal BC 20003 sudah melakukan penegahan berupa Ballpres (pakaian bekas) sebanyak 5 kapal (masing-masing kapal rata-rata membawa 2000 ballpres), serta Amonium Nitrat 82,5 Ton (Bahan dasar Peledak). 1 (satu) tahun di BC 20003 kemudian Aris mendapat kepercayaan untuk menjadi nakhoda di kapal patroli baru yaitu BC 30002 yang berukuran lebih besar. Kapal baru rupanya berbanding lurus dengan prestasi Aris dalam melakukan patroli. Total Aris bersama tim di kapal BC 30002 sudah melakukan penegahan berupa Pasir Timah sebanyak 15 Ton, Ballpres sebanyak 1000 ball, Amonium Nitrat sebanyak 60 Ton, Ballpres plastik bekas sebanyak 500 ball.

Tim adalah Keluarga

Aris adalah tipe nakhoda yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Di kapal manapun, ia selalu berusaha menerapkan prinsip bahwa tim adalah keluarga. Bahwa ketika sebuah tim telah menjadi sebuah keluarga, maka keberhasilan akan lebih mudah diperoleh. Aris berusaha selalu merangkul awak kapal yang berada di bawah tanggung jawabnya.

“Setelah saya renungkan selain menerapkan nilai-nilai budaya organisasi, kepemimpinan yang sifatnya bisa merangkul semuanya (anak buah) juga merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran. Tidak seperti kepemimpinan yang sifatnya otoriter, angkuh, dan sombong karena menjadi seorang pemimpin”, demikian katanya. Dan satu lagi kunci utama kesuksesan kata Aris adalah mensyukuri apa yang ada dan apa yang di dapat di dalam lingkungan organisasi tersebut. Buatlah tempat kerja yang menyenangkan meski tempat kerja itu tidak menyenangkan.

Meski bukan pemimpin yang otoriter, tapi Aris tetaplah pemimpin yang tegas. Ia tidak segan untuk mengganti awak kapalnya apabila tidak dapat bekerja sama dengannya. Lebih baik menghilangkan “virus” daripada “virus” tersebut menyebar dan malah merusak tatanan yang sudah baik.



Foto: Biro KLI-Kemenkeu

Foto: Gathot Subroto



Penyuka olahraga sepakbola dan Futsal ini juga selalu memanfaatkan hobinya untuk mempererat tali persaudaraan di antara awak kapal. Apabila kapal sedang bersandar, maka futsal adalah kegiatan yang tidak pernah dilewatkan. Kini atas inisiatif Aris, telah ada pertandingan futsal antar awak kapal di lingkungan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

Aris memiliki motto hidup untuk Bekerjalah dengan hati yang tulus dan selalu bersyukur pada Allah SWT. Karena bagi Aris, dengan hati ia dapat menghadapi perubahan dan tantangan pekerjaan.

Suka Duka dalam Patroli Laut

Sebagai seorang pelaut, jelas bahwa Aris bersama tim sering meninggalkan keluarga, “alhamdulillah

dengan dukungan dari keluarga saya bisa bekerja dengan tenang. Pekerjaan setiap harinya selama patroli 24 jam sehari, walaupun tidur kadang kalau ada pemeriksaan harus cepat bangun,” kata Aris.

Banyak resiko yang dihadapi petugas patroli laut, misalnya dalam melakukan pengawasan atau patroli kadang-kadang mendapatkan perlawanan dari pelaku penyelundupan. Aris bersama tim pernah mendapatkan perlawanan berupa ditabraknya kapal penyelundup ke kapal patroli, lalu pada saat mau memeriksa kapal pengangkut barang kapal patroli dikelilingi kurang lebih 6 kapal jenis speedboat yang terdiri per speedboat nya terdapat kurang lebih 10 orang dengan membawa pedang dan bom molotov.

Selain itu, Aris bersama tim pernah terjebak cuaca buruk pada saat bulan puasa, dan mengharuskan mereka berlindung di dekat pulau kecil yang ada berpenduduk sekitar 50 orang dengan 10 rumah. Aris hingga beberapa kali mencoba melintasi lautan untuk pulang ke Pang-

kalan tapi tidak berhasil karena kuatnya ombak. Hingga akhirnya Aris bersama tim kehabisan bahan makanan. Total Aris terdampar selama 5 hari hingga ombak agak berkurang. Kemudian Aris bersama tim mencoba melanjutkan perjalanan untuk pulang ke pangkalan. Saat di pertengahan jalan, ternyata ombak besar kembali menghadang, tetapi perjalanan tetap dilanjutkan karena bahan makanan telah habis, dan mesin kapal rusak satu. “Saya hanya termenung dan sambil berpikir karena ombak begitu besarnya. Saya hanya bisa berdoa untuk keselamatan,” kata Aris menuturkan. Untunglah setelah itu Aris bersama tim dapat mencapai pangkalan dengan selamat.

Selain duka, tentu ada suka dan kebanggaan saat bekerja. Seperti pada saat Patkor Kastima atau Patroli gabungan dengan Bea Cukai Malaysia. Aris bersama tim bisa berjalan-jalan di Malaysia dengan di antar oleh pegawai Bea dan Cukai Malaysia. Dan pada saat patroli pun ada pertukaran ABK kapal dengan kapal patroli Bea Cukai Malaysia.

Aris juga berkesempatan bertemu dengan presiden untuk mendengarkan arahan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara karena Aris terpilih mewakili pelaksana dari Kementerian Keuangan. Dan tentu saja yang paling membanggakan adalah menjadi pegawai teladan Kementerian Keuangan pada tahun 2011.

Kembali ke Kuningan

Di akhir wawancara, Aris yang memiliki Istri bernama Lia Ummu Salamah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arya Hafidz Amrullah mengemukakan beberapa harapannya ke depan. Yang pertama, Aris menginginkan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun dapat menjadi Pangkalan yang Modern. Kemudian yang terakhir, Aris ternyata memiliki keinginan “suatu saat nanti saya ingin dapat mengabdikan kepada negara sekaligus mengabdikan pada ibu di kampung halaman di Kuningan”, tutur Aris. [mfk]

Bekerjalah dengan hati yang tulus, dan selalu bersyukur pada Allah SWT.



Foto: Eros L. Mursalin

PERHATIAN PESERTA DIDIK SEBAGAI PEMICU KEBERHASILAN PEMBELAJARAN

OLEH: RITA DWI LINDAWATI

“atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia.”

-Sternberg (2006)-

“Pembelajaran sebagai setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman.”

-Robbins(2011)-

“Perhatian“, satu kata yang tidak asing dalam proses pembelajaran. Sering pengajar menegur siswa, karena dalam proses pembelajaran, dia dianggap “tidak memperhatikan”. Ketika peserta didik terlihat “asyik bermain sendiri”, diberi pertanyaan tidak ada “respon”, atau selama proses pembelajaran peserta didik gaduh, sering pengajar memberikan reaksi dengan mengatakan, “Coba perhatikan Saudara-saudara!” Dari kejadian yang biasa terjadi dalam proses pembelajaran tersebut ternyata pengajar menyadari bahwa perhatian suatu hal yang penting untuk mewujudkan keberhasilan peserta

5

Jenis
Perhatian1 Perhatian
Selektif2 Perhatian
Terfokus

didik dalam proses pembelajaran.

Pengertian “Perhatian” dan Pembelajaran

Beberapa ahli psikologi ternyata telah mendefinisikan kata “perhatian”. Menurut Sternberg (2006), atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumberdaya mental yang terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsang tertentu. Menurut Robert E. Slavin (2011), perhatian adalah pemusatan pikiran aktif pada rangsangan tertentu dengan menyingkirkan rangsangan lain. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perhatian adalah proses secara sadar dengan cara pemusatan pikiran secara aktif pada rangsangan tertentu atau informasi tertentu.

Disisi lain, Robbins (2011) menjelaskan definisi **Pembelajaran** sebagai setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Menurut Mc. Gehee (1958), pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya. Adapun pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Menurut beberapa pakar pembelajaran, prinsip umum pembelajaran meliputi **perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu.**

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasa-

kan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Apabila dalam diri peserta didik tidak ada perhatian terhadap pelajaran yang dipelajari, maka peserta didik tersebut perlu dibangkitkan perhatiannya.

Untuk membangkitkan perhatian peserta didik, perlu dibangkitkan minatnya terhadap pelajaran. Peserta didik yang berminat terhadap pelajaran tersebut akan cenderung tertarik perhatiannya pada pelajaran itu, sehingga timbullah motivasi untuk mempelajarinya. Ada tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya. Bagaimanakah tingkah laku peserta didik yang mempunyai motivasi belajar? Peserta didik yang mempunyai motivasi akan menunjukkan tingkah laku sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar.
2. Berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut;
3. Terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan.

Tinjauan Psikologi Pendidikan terhadap Perhatian Peserta Didik

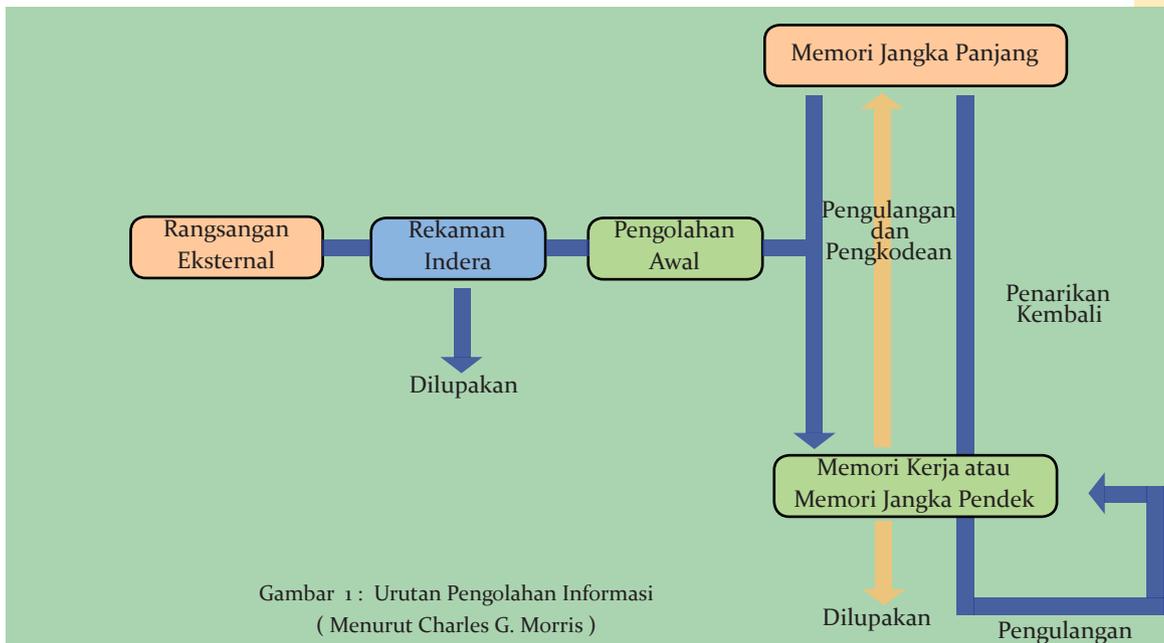
Groover menyebutkan bahwa **faktor yang mempengaruhi persepsi dan ingatan adalah perhatian (*attention*)**. Perhatian merupakan aktivitas menjaga sesuatu tetap dalam pikiran yang membutuhkan kerja mental dan konsentrasi. Terdapat 5 jenis perhatian, yang penting kita ketahui yaitu:

1. Perhatian selektif (*Selective Attention*)

Perhatian selektif terdapat pada situasi dimana seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Penerima informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian selektif adalah harapan, stimulus, dan nilai-nilai. Penerima informasi mengharapkan sebuah sumber tertentu menyediakan informasi dan memberikan perhatian lebih pada sumber tersebut, memilih stimulus yang paling memberikan efek atau terlihat dibanding yang lain, dan memilih sumber informasi yang paling penting.

2. Perhatian terfokus (*Focused Attention*)

Perhatian terfokus mengacu pada situasi di-



mana seseorang diberikan beberapa input namun harus fokus pada satu input saja selama selang waktu tertentu. Penerima informasi berfokus pada satu sumber/input dan tidak terdistraksi oleh gangguan-gangguan lain. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian terfokus adalah jarak dan arah, serta gangguan dari lingkungan sekitar. Penerima informasi akan lebih mudah menerima informasi dari sumber yang berada langsung di depannya.

3. Perhatian terbagi (*Divided Attention*)

Perhatian terbagi terjadi ketika penerima informasi diharuskan menerima informasi dari berbagai sumber dan melakukan beberapa jenis pekerjaan sekaligus.

4. Perhatian yang terus menerus (*Sustained Attention*)

Perhatian terus menerus dilakukan penerima informasi yang harus melihat sinyal atau sumber pada jangka waktu tertentu yang cukup lama. Dalam situasi ini sangat penting bagi penerima informasi untuk mencegah kehilangan sinyal.

5. Kurang perhatian (*Lack of Attention*)

Kurang perhatian merupakan situasi dimana penerima informasi tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Situasi ini disebabkan oleh kebosanan/kejujuran dan kelelahan. Ciri-ciri pekerjaan yang dapat menimbulkan situasi kurang perhatian

adalah pekerjaan dengan siklus pendek, sedikit membutuhkan pergerakan tubuh, lingkungan yang hangat, kurangnya interaksi dengan pekerja lain, motivasi rendah, dan tempat kerja memiliki pencahayaan yang buruk.

Pengaruh Perhatian Dalam Proses Pembelajaran

Bagaimanakah proses perhatian mempengaruhi pembelajaran? Untuk mengetahui proses tersebut penulis menggunakan salah satu teori pembelajaran kognisi, yaitu TEORI PENGOLAHAN INFORMASI. Teori Pengolahan Informasi adalah teori pembelajaran kognisi yang menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penarikan kembali pengetahuan di dalam pikiran

Pada prinsipnya pada proses pengolahan informasi ini, ada 3 komponen utama yang bekerja yaitu rekaman indera, memori kerja (memori jangka pendek) dan memori jangka panjang. Sebelum meninjau proses pengolahan informasi, mari kita mengenal 3 komponen utama tersebut. **Rekaman indera** adalah komponen sistem memori dimana informasi diterima dan dipertahankan dalam jangka waktu sangat singkat. **Memori kerja** atau memori jangka pendek adalah komponen memori yang menjadi tempat penyimpanan informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Sedangkan **memori jangka panjang** adalah komponen memori di mana informasi dalam jumlah besar dapat disimpan untuk kurun waktu yang lama.

3 Perhatian Terbagi

4 Perhatian Terus Menerus

5 Kurang Perhatian

Memori jangka panjang dianggap sebagai penyimpanan yang bersifat sangat besar dan bermemori sangat panjang. Bahkan, banyak pakar percaya bahwa kita mungkin tidak pernah melupakan informasi dalam memori jangka panjang. Dengan mengenal sifat-sifat ketiga komponen tersebut, maka menjadi suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran untuk mengetahui bagaimanakah suatu informasi diolah sehingga tersimpan dalam memori jangka panjang.

Agar dapat diingat, bahwa informasi harus lebih dahulu menjangkau indera seseorang, kemudian diberi **perhatian** dan dipindahkan dari rekaman indera ke memori kerja. Informasi yang diolah (dipikirkan atau aktif) dalam memori kerja tidak hanya berasal dari rekaman indera, tetapi juga dapat berasal dari memori jangka panjang. (informasi yang telah tersimpan sebelumnya). Kedua informasi tersebut dapat datang secara bersamaan ke memori kerja untuk diolah. Hanya informasi yang diberi perhatian yang dapat diteruskan dimemori kerja.

Dalam memori kerja, informasi tersebut dipikirkan dan diolah, kemudian diteruskan ke memori jangka panjang. Hanya informasi yang dipikirkan (aktif) dalam memori kerja sajalah yang akan diteruskan untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Makin lama informasi bertahan dalam memori kerja, makin besar kemungkinan hal tersebut dipindahkan ke memori jangka panjang. Menurut ahli psikologi ada beberapa cara agar informasi tersebut lama tersimpan dalam memori kerja, yaitu dengan cara memikirkannya atau mengucapkannya berulang-ulang (*rehearsal*), mengorganisasikan informasi dengan baik dan mengaitkan informasi tersebut dengan informasi yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang peserta didik.

Implikasi dalam Dunia Pendidikan

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa keberhasilan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik dapat diukur dari bagaimana peserta didik mampu mengungkap kembali informasi atau pesan yang disampaikan oleh pengajar dengan be-

nar. Untuk itu peserta didik harus mampu mengingat informasi tersebut.

Ada dua hal penting agar informasi itu mampu diingat yaitu perhatian dan proses pemikiran. Hanya informasi yang diberi perhatian yang mampu masuk ke memori kerja untuk diolah. Dan hanya memori yang selalu dipikirkan (diaktifkan) dalam memori kerja yang akan diteruskan ke memori jangka panjang. Untuk itu pengajar harus mampu memusatkan perhatian peserta didik pada pelajaran yang sedang dihadapinya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memperoleh perhatian peserta didik dalam praktek pengajaran:

- Menggunakan isyarat yang menunjukkan “ini penting”, dengan menaikkan atau menurunkan suara mereka untuk menandakan bahwa mereka hendak menyampaikan informasi penting.
- Menggunakan gerakan tubuh, pengulangan, atau posisi tubuh untuk menyampaikan pesan yang sama.
- Meningkatkan kandungan emosi bahan pelajaran. Gunakan kata-kata yang mampu memancing emosi positif peserta didik.
- Rangsangan yang tidak biasa, tidak konsisten, atau mengejutkan juga menarik perhatian. Misalnya, pengajar mendahului pelajaran dengan peragaan atau sulap untuk memikat keingintahuan peserta didik atau selingan lelucon untuk menghidupkan pengajaran.
- Penginformasian kepada peserta didik bahwa hal berikut penting bagi mereka akan merebut perhatian mereka. Misalnya, pengajar dapat memastikan untuk memperoleh perhatian dengan mengatakan kepada peserta didik, “Ini akan masuk ke dalam ujian besok”.
- Memberikan ilustrasi untuk pengajaran dengan grafik yang mudah dipahami dapat membantu mempertahankan perhatian peserta didik. Namun, terlalu banyak variasi cara penyajian dapat merugikan pencapaian jika hal itu mengalihkan per-

hatian peserta didik dari sisi pelajaran.

- Pengajar menyajikan materi pelajaran dengan antusias dan ekspresi. Penyajian dengan antusias dan ekspresi ternyata lebih diperhatikan oleh peserta didik dibandingkan ceramah yang kering.
- Menjaga lingkungan belajar agar tidak mengganggu perhatian peserta didik (memastikan kenyamanan ruang belajar).

Sedangkan cara agar informasi tersebut terus dipikirkan dalam memori kerja adalah sebagai berikut:

- Pengajar harus menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan selama pelajaran di ruang kelas. Pengajar dapat mengatur tempo dan jumlah penyampaian informasi. Informasi jangan disampaikan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Pengajar sekali-kali menghentikan pengajarannya selama pembelajaran untuk memberi kesempatan peserta didik untuk mengolah (memikirkan dan mengulang dalam pikiran) informasi yang diterima dan mengajukan pertanyaan. Pengolahan informasi sangat penting untuk peserta didik ketika mempelajari bahan yang baru dan sulit.
- Mengorganisasikan informasi dengan baik agar informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan diingat dalam waktu yang lama oleh peserta didik. Misalnya pengajar membuat peta konsep, alur proses, simbol, akronim atau bagan.

Dengan memahami cara-cara tersebut pengajar diharapkan mampu membuat strategi pengajaran yang dapat mengantarkan peserta didik dalam memperoleh prestasi belajar yang gemilang.



Ilustrasi: Gathot Subroto

Where is our leader ??

WANTED !!!

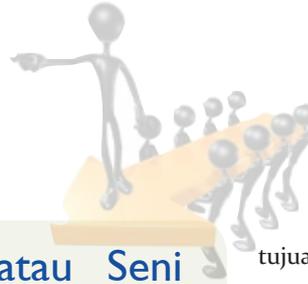
SOSOK PEMIMPIN YANG DIRINDUKAN

OLEH: HERRU WIDIATMANTI

“Kepemimpinan adalah kombinasi yang sangat kuat dari strategi dan karakter. Namun jika harus memilih salah satunya, pilihlah karakter.”

- Jenderal H. Norman Schwarzkopf

Dalam beberapa kelas pendidikan dan pelatihan (diklat) saya meminta peserta diklat untuk melakukan *mapping* permasalahan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Beberapa masalah yang mencuat dari hasil diskusi itu adalah, faktor miskinnya keteladanan, inkonsistensi penerapan aturan, lemahnya pengambilan keputusan dan kurang ahlinya pengelolaan manajemen risiko



Kepemimpinan yaitu Kegiatan atau Seni Mempengaruhi Orang Lain Agar Mau Bekerjasama yang Didasarkan pada Kemampuan Orang Tersebut untuk Membimbing Orang Lain dalam Mencapai Tujuan-Tujuan yang Diinginkan Kelompok.

- Tead; Terry; Hoyt

pada berbagai strata manajemen. Tanpa sebuah penelitian tentu pendapat yang disampaikan itu belum tentu akurat. Namun tidak ada salahnya kita mencoba menelisis hal itu.

Fenomena belakangan ini, di berbagai media sering diberitakan tentang terjadinya gejala sosial masyarakat yang sering muncul di berbagai daerah dan kerap kali membawa korban jiwa. Banyaknya pimpinan berbagai lembaga yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seringnya muncul konflik antar pimpinan yang berlarut-larut secara terbuka di media publik. Berbagai berita yang kurang menyenangkan itu menggambarkan pada simpulan adanya salah satu faktor penting yaitu pimpinan yang kurang memiliki jiwa kepemimpinan.

Dalam artikel ini penulis ingin ikut memberikan pendapat jiwa kepemimpinan seperti apakah yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan lembaga sektor publik yang ada di negeri ini.

Definisi Kepemimpinan (*Leadership*)

Mengutip beberapa definisi kepemimpinan dari para ahli manajemen. Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003), *pengertian kepemimpinan* yaitu kegiatan atau

seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) *pengertian kepemimpinan* yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Moejiono (2002) memandang bahwa *leadership* tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (*compliance induction theorist*) cenderung memandang *leadership* sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai

tujuan organisasi.

Beda antara Pemimpin dan Pimpinan

Secara singkat dapat diartikan bahwa pemimpin (*leader*) adalah orang yang melakukan/menjalankan kepemimpinan (*leadership*). Sedangkan kata pimpinan mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hirarki tertentu dalam suatu organisasi yang mempunyai bawahan dan yang karena kedudukannya mempunyai wewenang (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Dengan demikian maka seorang pimpinan belum tentu dia dapat disebut pemimpin apabila pimpinan tersebut tidak mampu melakukan fungsi kepemimpinan dengan baik.

Model (gaya) kepemimpinan

Ada berbagai model/gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli organisasi, antara lain:

1. Model kepemimpinan Autokratis

Menurut Rivai (2003), kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi.

Robbins dan Coulter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan autokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan.

Lebih lanjut Sukanto (1987) menyebutkan ciri-ciri gaya kepemimpinan autokratis: semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin; teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkatan yang luas; dan, pemimpin

biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap anggota.

Sedangkan menurut Handoko dan Reksohadiprodjo (1997), ciri-ciri gaya kepemimpinan autokratis: pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan; komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja; pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota; dan, pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya.

2. Gaya kepemimpinan Demokratis/Partisipatif

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri (Rivai, 2006).

Menurut Robbins dan Coulter (2002), gaya kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong parti-

sipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan.

Jerris (1999) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang menghargai kemampuan karyawan untuk mendistribusikan knowledge dan kreativitas untuk meningkatkan servis, mengembangkan usaha, dan menghasilkan banyak keuntungan dapat menjadi *motivator* bagi karyawan dalam bekerja.

Sukanto (1987), ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis adalah: semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin; kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih; para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.

Handoko dan Reksohadiprodjo (1997) menyebutkan ciri-ciri kepemimpinan demokratis yaitu: lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan

organisasi; menekankan dua hal yaitu bawahan dan tugas; pemimpin adalah obyektif atau fact-minded dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan.

3. Gaya Kepemimpinan *Laissez-faire* (Kendali Bebas)

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai (Robbins dan Coulter, 2002).

Menurut Sukanto (1987) ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas: kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin; bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat ditanya; sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas; kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian.

Ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas (Handoko dan Reksohadiprodjo, 1997): pemimpin membiarkan bawahnya untuk mengatur dirinya sendiri; pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum; bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok..

4. Gaya Kepemimpinan ala Indonesia

Banyak sekali filosofi kepemimpinan ala Indonesia sejak zaman Majapahit dulu. Ada gaya kepemimpinan ala falsafah Jawa bahwa seorang pemimpin memiliki sifat: 1. **Wijaya**, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar dan bijaksana serta tidak lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan karena hanya dengan jiwa yang tenang

Seorang Pimpinan Belum Tentu Dia Dapat Disebut Pemimpin Apabila Pimpinan Tersebut Tidak Mampu Melakukan Fungsi Kepemimpinan dengan Baik.

masalah akan dapat diselesaikan; 2. **Man-triwira**, seorang pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun; 3. **Natangguan**, seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut sebagai tanggung jawab dan kehormatan; 4. **Satya Bakti Prabu**, seorang pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa; 5. **Wagmiwak**, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya, pandai berbicara dengan tutur kata yang tertib dan sopan serta mampu menggugah semangat masyarakatnya; 6. **Wicaksaneng Naya**, seorang pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasat; 7. **Sarjawa Upasama**, seorang pemimpin harus rendah hati, tidak boleh sombong, congkak, mentang-mentang jadi pemimpin dan tidak sok berkuasa; 8. **Dirosaha**, seorang pemimpin harus rajin dan tekun bekerja, pemimpin harus memusatkan rasa, cipta, karsa dan karyanya untuk

mengabdikan kepada kepentingan umum; 9. **Tan Satresna**, seorang pemimpin tidak boleh memihak/pilih kasih terhadap salah satu golongan atau memihak saudaranya, tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya untuk mensukseskan cita-cita bersama; 10. **Masihi Samasta Buwana**, seorang pemimpin mencintai alam semesta dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan/Hyang Widi dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat; 11. **Sih Samasta Buwana**, seorang pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya; 12. **Negara Gineng Pratijna**, seorang pemimpin senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan, maupun keluarganya; 13. **Dibyacita**, seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain atau bawahannya; 14. **Sumantri**, seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih dan berwibawa; 15. **Nayaken Musuh**, seorang pemimpin

harus dapat menguasai musuh-musuh, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk juga yang ada di dalam dirinya sendiri; 16. **Ambek Parama Arta**, seorang pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum; 17. **Waspada Purwa Arta**, seorang pemimpin selalu waspada dan mau melakukan mawas diri untuk melakukan perbaikan; 18. **Prasaja**, seorang pemimpin supaya berpola hidup sederhana, tidak berfoya-foya atau serba gemerla

Begitu indahnnya filosofi kuno tentang sifat seorang pemimpin. Dalam budaya jawa sebenarnya juga sangat sarat dengan filsafat hidup (ular-ular). Ada yang disebut **Hasta Brata** yang merupakan teori kepemimpinan, berisi mengenai hal-hal yang disimbolisasikan dengan benda atau kondisi alam seperti **Surya, Chandra, Kartika, Angkasa, Maruta, Samudra, Dahana** dan **Bhumi**. Sesungguhnya masih banyak lagi filsafat hidup atau yang disebut masyarakat Jawa sebagai ular-ular, tentang kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin yang sangat indah dan agung apabila diimplementasikan.

Kepemimpinan yang ideal untuk Indonesia.

Indonesia adalah negara besar baik dari luas wilayah, jumlah penduduk, banyaknya suku bangsa, keragaman budaya, keragaman tingkat pendidikan dan tingkat sosial masyarakatnya. Sehingga model/gaya kepemimpinan tidak bisa hanya mengadopsi salah satu dari model kepemimpinan yang telah diuraikan diatas. Kepemimpinan yang ideal bagi bangsa Indonesia harus memperhatikan keragaman dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Konsep kepemimpinan yang ideal bagi bangsa Indonesia sebenarnya telah ditemukan dan disusun sejak lama. Yang sering kita dengar dan sederhana adalah konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui tiga filosofinya. Sering kali kita melupakan ada teori kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Bapak Bangsa kita sendiri. Para pimpinan saat



Sumber: bogusleadership.blogspot.com

ini sibuk mencari teori kepemimpinan yang paling tepat, namun dalam implementasinya sering terlupakan oleh banyak para pimpinan organisasi di negeri ini.

Ketiga filosofi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantoro sebaiknya dimiliki oleh para pimpinan sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor bisnis (*private sector*) karena sangat relevan dan cocok dengan kondisi saat ini. Bahkan filosofi kepemimpinan tersebut selaras juga dengan teori-teori kepemimpinan modern. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro ini sudah tidak asing bagi kita semua yaitu: ***Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani.***

Ing ngarsa sung tuladha.

Filosofi ini memiliki arti bahwa seseorang yang berada di garis depan atau seorang pemimpin, harus bisa memberi contoh dan teladan kepada para anggotanya. Seorang *leader* akan dilihat oleh *follower*-nya sebagai panutan. *Follower* tidak hanya memperhatikan perilaku dari seorang *leader* secara pribadi, namun juga meliputi sejauh mana nilai-nilai budaya organisasi telah tertanam dalam diri pemimpinnya. Bagaimana cara *leader*-nya dalam mengatasi masalah, sejauh mana *leader* berkomitmen terhadap organisasi, sampai kerelaan seorang *leader* untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, sepatutnya seorang *leader* memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat menjadi teladan untuk para *follower*-nya. *Leader* yang memiliki kharisma atau seorang pemimpin yang kharismatik akan lebih mudah menjalankan peran ini. Hal ini disebabkan oleh kharisma mereka akan dapat menginspirasi para *follower*-nya.

Ing madya mangun karsa.

Filosofi ini berarti bahwa seorang *leader* harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah *follower*-nya sebagai pemberi semangat, motivasi, dan stimulus agar *follower* dapat mencapai kinerja

yang lebih baik. Melalui filosofi ini, jelas bahwa seorang *leader* harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan *follower*-nya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan memotivasi *follower* untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Memberikan ruang bagi *follower* untuk ikut berkontribusi bagi organisasinya. Teori-teori motivasi memiliki peranan penting bagi seorang *leader* untuk mengaplikasikan peranan sesuai filosofi ke dua ini.

Tut wuri handayani.

Filosofi yang terakhir ini memiliki makna bahwa seorang *leader* tidak hanya harus memberikan dorongan, namun juga memberikan arahan untuk kemajuan organisasi. Arahan di sini berarti *leader* harus mampu mengarahkan usaha-usaha *follower*-nya agar sejalan dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. *Leader* juga harus mampu memberikan kepercayaan kepada *follower*-nya untuk mengembangkan organisasi dalam mencapai tujuan dengan kendali pengawasannya. Sebagai dasarnya, nilai-nilai organisasi harus tertanam kuat dalam diri masing-masing anggota. *Leader*-lah yang menginspirasi, memberikan kepercayaan anggota untuk mengembangkannya dan mengambil alih segala risikonya.

Ketiga filosofi di atas saling berkaitan dan tidak dapat ditinggalkan salah satunya. Sebagai contoh, usaha seorang pemimpin untuk menanamkan nilai-nilai organisasi kepada stafnya. Dalam hal ini, seorang *leader* tidak bisa begitu saja mendorong dan mengarahkan perilaku *follower*-nya agar sesuai dengan nilai-nilai organisasi (*tut wuri handayani*). Namun, *leader* tersebut juga harus mampu memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai organisasi telah tertanam dalam dirinya (*ing ngarsa sung tuladha*). Sembari memberi contoh, *leader* juga harus mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut ke tengah-tengah *follower*-nya, dan memotivasi mereka untuk bertindak sejalan dengan nilai-nilai itu (*ing madya mangun karsa*).

Penutup

Diperlukan kebesaran jiwa dari semua komponen bangsa untuk memperoleh pimpinan yang memiliki jiwa pemimpin. Penyelarasan pola pikir individu dan pembenahan kepemimpinan *top team* untuk seluruh organisasi. Kedua hal ini adalah yang paling menentukan dan membedakan suatu bangsa, institusi atau organisasi akan menjadi organisasi yang hebat, biasa-biasa saja, atau bahkan mati suri. Jepang berhasil mengejar ketertinggalannya dengan Barat melalui gerakan kualitas, dan Korea mampu bersaing di pasaran internasional dengan program survival atau kuantum.

Indonesia sebenarnya dapat mengikuti jejak kedua bangsa itu, mengejar ketertinggalan melalui gerakan penyelarasan *mindset* (*mindset alignment movement*). Syaratnya, pejabat pemerintah dalam berbagai strata manajemen harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa. Para guru, dosen, instruktur, trainer, widyaiswara atau apa pun namanya yang memiliki tugas berbagi ilmu harus memiliki mentalitas seorang guru yang melihat dirinya sebagai pendidik bukan pengajar seperti seorang Ki Hajar Dewantara.

Menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan sedari masih anak-anak dan terus diingatkan ketika mereka duduk memegang amanah sebagai pimpinan. Berikutnya, secara sederhana prinsip filosofi kepemimpinan asli Indonesia itu seharusnya dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat juga sudah seharusnya semakin cerdas dalam memilih sosok pemimpin yang memiliki karakter yang kuat. Maka selama itu pula kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang berarti. Mimpikah ini?? TIDAK, jika semua mau mengimplementasikan apa yang diketahui, mau berkontribusi dan bersinergi dengan baik. Di tangan pemimpin-pemimpin yang baik BANGSA KITA PASTI SEJAHTERA.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



Sistem **Perbendaharaan** dan **Anggaran** Negara (**SPAN**)

“Reformasi Berbasis Teknologi Informasi”

OLEH: NOORCHOLISH MADJID

Reformasi pengelolaan keuangan Negara terus berlanjut. Salah satu program yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusintek Kemenkeu untuk menyempurnakan reformasi pengelolaan keuangan Negara adalah dengan mengembangkan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN). Tulisan ini mencoba menguraikan secara ringkas peran SPAN bagi kelangsungan reformasi Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia.

Latar Belakang

Dalam rangka implementasi reformasi pendekatan penganggaran yaitu *Unified Budgeting*, *Performance Based Budgeting (PBB)*, dan *Medium Term Expenditure Framework* diperlukan modernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan Negara. Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan berinisiatif untuk melaksanakan modernisasi sistem informasi tersebut melalui Program Reformasi Penganggaran dan Per-

bendaharaan Negara (RPPN).

Program RPPN adalah upaya untuk menerapkan Paket UU di bidang Keuangan Negara secara utuh, termasuk penerapan PBB dan Accrual Based Accounting sehingga tercipta “good governance” dalam pengelolaan keuangan Negara yang menyeluruh, modern, dan terintegrasi. Berdasarkan KMK No. 72/KMK.05/2009 tgl 10/3/2009 tentang RPPN: Program RPPN dilakukan oleh seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran, dengan melibatkan unit Eselon I terkait dan kementerian/lembaga yang ikut dalam “pilot project”. Bentuk pelaksanaan Program RPPN, dilakukan Penyempurnaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atau biasa dikenal “SPAN Project” dibawah payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFM-RAP).

SPAN Menjawab Tantangan Reformasi Pengelolaan Keuangan

Reformasi pengelolaan Keuangan telah dimulai oleh Kementerian Keuangan sejak berlakunya Paket UU di bidang Keuangan Negara. Reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan anggaran negara yang akuntabel, profesional, proporsional, dan transparan. Reformasi yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.

Proses-proses yang sifatnya pengulangan (*repetition*) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah:

- 1) penggunaan *database* tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
- 2) perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
- 3) pembakuan *business rules* untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak baik lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal seperti kementerian lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh *stakeholders*.

Penerapan SPAN selanjutnya diyakini akan mampu Mengendalikan anggaran negara, aset dan kewajiban pemerintah pusat; Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat dan selanjutnya Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Kelebihan SPAN

Sebagai suatu sistem, SPAN menawarkan kelebihan-kelebihan antara lain:

1. Sistem berbasis COTS (Suatu sistem aplikasi komputer yang tidak dijual bebas karena peruntukannya yang spesifik, misal: pemerintahan). Aplikasi ini akan berbasis Oracle. Selama bergaul dengan KPPN, sedikit banyak kita sudah mengetahui atau

pernah mendengar MySQL atau Foxpro, maka Oracle adalah aplikasi sejenis.

2. Sistem dengan *platform*. Yang dimaksud *platform* disini adalah sistem operasi atau seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. ;
3. Sistem dengan database terpusat. *Server Database* SPAN di tempatkan di Jakarta dan *Backup Server Database* akan di tempatkan di Surabaya dan Balikpapan;
4. Sistem dengan perekaman data hanya satu kali. Diharapkan kedepan tidak ada lagi entri data berulang dan tumpang tindih antar aplikasi;
5. Sistem dengan *business rules* baku. *Business rule* yang ada selama ini sering berubah secara dinamis mengikuti peraturan yang sering pula berubah-ubah. Akibatnya, para stakeholder mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan yang terus menerus terjadi dalam waktu singkat. Dengan sistem ini, akan tercipta suatu business rule yang konstan;
6. Sistem yang terhubung secara *on-line*. Aplikasi yang terhubung dengan menggunakan semacam *cloud server* dan berbasis internet memungkinkan semua data dapat terpantau secara *real time*, sama seperti sistem perbankan saat ini.

Sasaran SPAN

Beberapa sasaran yang hendak dicapai dengan implementasi SPAN antara lain adalah:

1. Otomatisasi proses operasional penganggaran dan perbendaharaan;
2. Meningkatkan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan utang pemerintah;
3. Meningkatkan efisiensi layanan kepada Kementerian/Lembaga, masyarakat dan perbankan;
4. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian LK yang lebih komprehensif, akurat dan te-

- pat waktu;
5. Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan;
 6. Penyediaan jejak audit (*audit trail*);
 7. Mengintegrasikan data pada berbagai sub sistem manajemen keuangan pemerintah.

Pelaksanaan SPAN

SPAN mempunyai tiga proyek utama yaitu: melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam proses bisnisnya, pengembangan TI yang lebih baik, dan *change management communication* (CMC).

a) Pengembangan Proses Bisnis

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem informasi yang mengintegrasikan tiga proses utama di Kementerian Keuangan yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan. SPAN melibatkan tiga unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan proses Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan Pelaksanaan Anggaran, serta Sekretariat Jenderal melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), terkait dengan infrastruktur Teknologi Informasi

Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen DIPA

Dengan melakukan penyempurnaan dalam manajemen DIPA diharapkan mempunyai dampak dalam memberikan penelaahan DIPA yang lebih cepat karena penelaahan hanya sampai 2 digit, ketika terjadi revisi prosesnya lebih cepat dengan cara memberikan fleksibilitas lebih banyak bagi satker untuk melakukan revisi anggaran, dari segi akuntabilitasnya lebih cepat yaitu semua komponen APBN akan dimasukkan dalam DIPA, meningkatkan efisiensi dan efektifitas karena telah mengadopsi Anggaran Berbasis Kinerja, membantu dalam perencanaan kas karena pada awalnya informasi rencana penarikan/

penerimaan dana pada halaman III tidak ter-update sehingga SPAN berupaya untuk membuat halaman III dapat ter-update.

Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen Komitmen dan Pembayaran

Mengatasi beberapa masalah sehingga dapat memberikan dampak antara lain: peningkatan budget control melalui manajemen komitmen, optimalisasi perencanaan kas melalui pemanfaatan *data liability* artinya penerapan konsep paperless dalam komunikasi data, mendukung penerapan accrual accounting, dan peningkatan kecepatan dan kepastian waktu pencarian dana karena adanya penerapan *e-disbursement* dalam proses pencairan dananya.

Penyempurnaan Proses Bisnis Manajemen Penerimaan dan Kas

Agar memberikan dampak bagi seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat tercatat dan terekonsiliasi dengan cepat sehingga dapat meningkatkan keamanan terhadap aliran dana yang terdapat pada rekening kelolaan BUN, serta mempermudah dalam pelaksanaan *forward cash planning*.

Penyempurnaan Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa SPAN mendukung dalam penerapan *accrual accounting* sehingga dari penerapan basis akuntansi ini dapat memberikan proses akuntansi yang baik dan relevan, juga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan informatif. Yang perlu diperhatikan adalah SPAN mengintegrasikan dua sistem (SAU dan SAKUN) menjadi Sistem Akuntansi Pusat yang terintegrasi yang berdampak pada tidak dipelupukannya rekonsiliasi antar sistem. Selain itu, pelaporan akan menggunakan basis GFS (*Government Financial Statistic*).

b) Pengembangan Teknologi Informasi

Beberapa hal dalam rangka penyempurnaan TI antara lain: penyempurnaan

TI Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yaitu dengan SPAN, pembangunan *Service Desk*, penyempurnaan TI Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dengan membangun SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) sebagai sistem pendukung SPAN.

c) *Change Management Communication* (CMC)

Change Management Communication dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat penerapan SPAN, mengantisipasi permasalahan akibat resistensi terhadap perubahan, membantu dalam membuat rencana, pedoman dan kontrol terhadap proses implementasi SPAN, memastikan bahwa stakeholder yang terkait dengan perubahan mampu melaksanakan peranannya yang baru, dan membuat perencanaan untuk menjaga sistem yang baru (dalam rangka *sustainability*) dan peningkatan secara kontinu terhadap sistem baru.

Sebagai suatu sistem, SPAN akan mudah diterima apabila mampu membuat pekerjaan lebih mudah dan sederhana. Penyederhanakan berbagai mekanisme yang selama ini masih dikerjakan secara manual, didukung basis teknologi informasi (TI) diyakini akan mengurangi dan memudahkan pekerjaan pengelolaan keuangan secara signifikan. Kondisi ini diyakini akan lebih memansuikan para pengelola keuangan.

Pada akhirnya sebagai sebuah sistem informasi penerapan SPAN diyakini mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan APBN. Dengan akuntabilitas dan transparansi yang tercipta maka tujuan reformasi pengelolaan keuangan "*good governance and clean government*" akan dapat benar-benar terwujud. Perkembangan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan Negara khususnya mengenai SPAN lebih lanjut dapat dibaca pada *website* resmi: [www. span. depkeu. go. id](http://www.span.depkeu.go.id)

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



ASSESSMENT RATIO (MENGUJI AKURASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK)

OLEH: DARWIN

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian Nilai Jual Objek Pajak menurut Undang-Undang PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan NJOP atas tanah (bumi) harus dicari transaksi

jual beli atas tanah dari berbagai sumber data seperti Notaris PPAT, Camat, Lurah, warga (penduduk) setempat, media cetak, atau media elektronik. Hasil pengumpulan data transaksi tersebut kemudian dianalisis kewajarannya untuk memperoleh Nilai Indikasi Rata-rata atas tanah. Nilai Indikasi Rata-rata atas tanah ini kemudian dikonversi ke dalam daftar klasifikasi tanah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil konversi ini merupakan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Sedangkan penentuan NJOP bangunan dilakukan

dengan cara menghitung Nilai Bangunan Baru dari bangunan tersebut kemudian dikurangi dengan penyusutan yang ada, baik penyusutan terhadap fisik bangunan, penyusutan fungsi maupun penyusutan ekonomi. Nilai bangunan yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam tabel klasifikasi bangunan untuk menentukan NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB.

Untuk memperoleh NJOP yang akurat perlu diadakan suatu pengukuran, dimana NJOP yang dihasilkan melalui konversi hasil penilaian tersebut harus dibandingkan dengan harga jual (*sales price*) dari objek yang bersangkutan. Perbandingan antara Nilai Jual suatu objek pajak dengan Harga Jual objek pajak yang bersangkutan disebut *Assessment Sales Ratio* dan di dalam tulisan ini selanjutnya disebut *Assessment Ratio*.

PENGERTIAN ASSESSMENT RATIO

Assessment Ratio (Assessment Sales Ratio) yang biasa disingkat A/S merupakan rasio dari suatu hasil penilaian terhadap suatu harga pasar atas objek yang sama. *The International Association of Assessing Officer* memberikan definisi *Assessment Ratio* sebagai berikut: "An assessment ratio is the ratio of an assessment to a proxy for fair cash or market value" (IAAO: 121). *Assessment sales ratio* sangat berguna bagi para penilai untuk menentukan beberapa hal yaitu:

1. Digunakan untuk memantau hasil penilaian.
2. Digunakan untuk penentuan kebijakan dalam melakukan penilaian kembali secara total.
3. Menentukan jumlah tenaga kerja dan pelatihan serta biaya untuk melakukan penilaian kembali.
4. Penting untuk mengestimasi Nilai Pasar Total atas semua objek dalam suatu kawasan.

Dengan kata lain, *assessment ratio* merupakan suatu alat yang diperlukan baik oleh pemerintah maupun para penilai dalam mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan nilai properti secara keseluruhan. Pengukuran *assessment ratio* ini menggunakan teori-teori statistik seperti distribusi frekwensi (*frequency distribution*) dan *histogram*, tendensi sentral, variabilitas, dan teori statistik lainnya yang berhubungan dengan penilaian properti.

DISTRIBUSI FREKWENSI DAN HISTOGRAM

Distribusi Frekwensi (*Frequency Distribution*) dan *histogram* merupakan suatu gambaran singkat dari distribusi data. Distribusi fekwensi dapat digunakan sebagai dasar pembanding dari suatu hasil observasi dan sering juga digunakan sebagai pengganti distribusi sebenarnya (Supranto: 84). *Histogram* (grafik batang) merupakan gambaran distribusi frekwensi dalam bentuk grafik. Di dalam studi *assessment ratio* distribusi frekwensi dan *histogram* dapat digunakan untuk menunjukkan sejumlah properti yang dinilai pada berbagai persentase dari nilai pasar. Struktur (bentuk) distribusi frekwensi dan *histogram* merupakan langkah pertama dalam analisis *assesment ratio*.

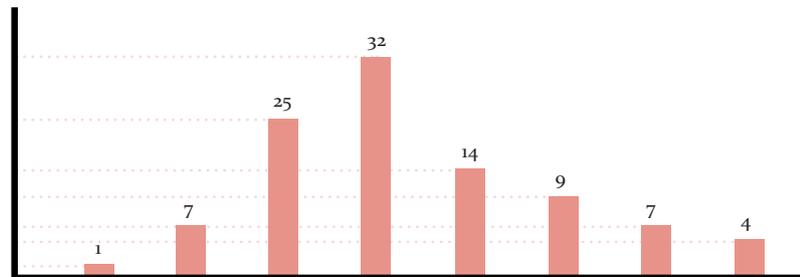
Contoh 99 (sembilan puluh sembilan) *assessment ratio* berikut:

0,087	0,102	0,107	0,124	0,128	0,136	0,143	0,149	0,150	0,153	0,157
0,159	0,161	0,164	0,164	0,168	0,171	0,172	0,174	0,178	0,179	0,180
0,183	0,184	0,186	0,189	0,190	0,192	0,195	0,196	0,196	0,198	0,199
0,200	0,202	0,203	0,205	0,208	0,210	0,211	0,214	0,214	0,215	0,215
0,216	0,217	0,219	0,219	0,220	0,223	0,227	0,227	0,228	0,230	0,232
0,233	0,237	0,238	0,238	0,240	0,241	0,243	0,247	0,248	0,249	0,250
0,253	0,257	0,261	0,262	0,263	0,263	0,269	0,271	0,276	0,281	0,283
0,294	0,297	0,302	0,309	0,314	0,322	0,330	0,336	0,339	0,344	0,347
0,353	0,356	0,366	0,370	0,371	0,388	0,397	0,419	0,428	0,444	0,449

Distribusi Frekwensi dari rasio-rasio tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Ratio	Tally	Frekwensi
0,050 – 0,099	I	1
0,100 – 0,149	IIII II	7
0,150 – 0,199	IIII IIII IIII IIII IIII	25
0,200 – 0,249	IIII IIII IIII IIII IIII IIII II	32
0,250 – 0,299	IIII IIII IIII	14
0,300 – 0,349	IIII IIII	9
0,350 – 0,399	IIII II	7
0,400 – 0,449	IIII	4
		99

Apabila rasio-rasio tersebut di atas dibuat dalam bentuk *histogram* adalah seperti gambar di bawah ini.



Melalui analisis distribusi frekwensi dan *histogram* dapat dikaji *assessment ratio* dengan berbagai frekwensi dan sebarannya. Disamping itu juga dapat dilihat kecenderungan adanya *over assessment* atau *under assessment*. Distribusi frekwensi dan *histogram assessment ratio* yang simetris mengindikasikan bahwa kecenderungan terjadinya *over assessment* sama besarnya dengan *under assessment*. Sedangkan distribusi frekwensi dan *histogram assessment ratio* yang tidak simetris menunjukkan bahwa kecenderungan adanya *over assessment* mungkin lebih besar dari *under assessment* ataupun sebaliknya.

PENGUKURAN TENDENSI SENTRAL

Pengukuran tendensi sentral dalam ilmu statistik menjelaskan properti-properti yang dinilai pada semua tingkatan. Tiga jenis pengukuran tendensi sentral yang biasa digunakan dalam mengukur *assessment ratio* yaitu: *median*, *mean* dan *weighted mean*.

1. Median Assessment Ratio

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya (Sugiyono:42). Apabila jumlah data yang akan dijelaskan berjumlah genap, maka *median* adalah merupakan rata-rata dari dua angka yang ditengah.

Median dari *assessment ratio* (A/S) adalah rasio pertengahan apabila rasio-rasio yang ada diurutkan sesuai dengan tingkatannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya.

Properti	Nilai Jual Objek Pajak	Harga Jual	A/S
1	2	3	4
1	Rp 237.675.000,00	Rp 375.000.000,00	0,634
2	Rp 800.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	0,667
3	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	0,800
4	Rp 1.258.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00	0,868
5	Rp 2.100.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00	0,875
6	Rp 1.025.000.000,00	Rp 1.085.750.000,00	0,944
7	Rp 1.245.000.000,00	Rp 1.275.000.000,00	0,976
8	Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	1,000
Total	Rp 8.665.675.000,00	Rp 10.085.750.000,00	6,764

Sebagai contoh:

Median dari *assessment ratio* data tersebut di atas adalah sebesar: $(0,868+0,875)/2 = 0,8715$

Median memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- Tidak memberikan pengaruh terhadap rasio yang ekstrim. Pada contoh di atas *median* tetap sama walaupun terdapat rasio yang terlalu rendah (0,634) ataupun rasio yang terlalu tinggi (1,000)
- Median assessment ratio* tidak menyebabkan estimasi yang bias terhadap *median assessment value ratio* (rasio terhadap nilai pasar wajar), yaitu nilai yang diciptakan oleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.



2. Mean Assessment Ratio

Mean aritmatik atau biasa disebut *mean*, adalah salah satu tipe rata-rata (*average*). *Mean* adalah ukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan. *Mean* dihitung dengan membagi jumlah nilai dari koleksi data dengan jumlah data tersebut (Hakim:121). *Mean* dari *assessment ratio* (A/S) adalah rasio rata-rata sederhana yang diperoleh melalui penjumlahan seluruh rasio yang ada kemudian dibagi dengan jumlah observasi. Dari contoh di atas *mean* dari *assessment ratio* adalah sebesar: $6,764/8=0,8455$.

Berbeda dengan *median*, *mean* lebih dapat dipengaruhi oleh rasio yang ekstrim. Di satu pihak hal ini dapat ditolerir namun di lain pihak tidak dapat ditolerir. *Mean* dapat ditolerir apabila kesalahan-kesalahan yang ekstrim sepenuhnya dicerminkan dalam pengukuran. Jadi apabila sejumlah properti dinilai sebesar 50% dari nilai pasar, sedangkan yang lainnya dinilai diatas 100% dari nilai pasar, *mean* akan mengindikasikan tingkat rata-rata penilaian diatas 50%, katakanlah 60%. Sebaliknya *mean* tidak dapat ditolerir apabila tidak mencerminkan suatu tingkatan apabila sejumlah properti dinilai. Sebagai contoh, apabila sejumlah properti dinilai sebesar 50% dan lainnya diatas 100%, *mean ratio* sebesar 60% dapat mengindikasikan bahwa *assess-*

ment ratio secara random didistribusikan sebesar 60% atau mungkin diatas 60%. Disamping itu *mean assessment ratio* memiliki ketidakefisienan teknis yaitu menimbulkan sesuatu yang bias terhadap *mean assessment value ratio*. Hal ini disebabkan oleh keanehan dari rasio data dan juga disebabkan suatu fakta bahwa harga-harga jual hanya merupakan suatu indikator dari nilai pasar wajar.

3. Weighted Mean Assessment Ratio

Weighted Mean Assessment Ratio (A/S) merupakan rasio total yang diperoleh melalui perbandingan antara total *assessment* (NJOP) terhadap total harga jual. Dari contoh di atas *weighted mean* adalah sebesar: $8.665.675.000/10.085.750.000 = 0,8592$. *Weighted mean assessment ratio* memberikan sesuatu yang bias terhadap *weighted mean assessment value ratio*. Namun kontras dengan *mean assessment ratio*, bias yang disebabkan oleh *weighted mean* akan menurun secara cepat apabila jumlah sampel bertambah banyak dan dalam praktek dapat diabaikan.

PERBANDINGAN PENGUKURAN TENDENSI SENTRAL

Tiga jenis pengukuran tendensi sentral yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan untuk mengukur secara sederhana keadaan distribusi dari hasil

penilaian dengan cara membandingkan pengukuran tersebut satu dengan lainnya.

1. Mean Ratio dibandingkan dengan Median Ratio

Di dalam ketentuan mayoritas penilaian, *mean* dari *assessment ratio* selalu lebih besar dari *median assessment ratio*. Perbandingan antara *mean* dengan *median* akan memberikan indikasi adanya *under assessment* atau *over assessment*. *Under assessment* menunjukkan suatu keadaan bahwa hasil penilaian berada di bawah harga pasar sedangkan *over assessment* menunjukkan bahwa hasil penilaian di atas harga pasar. Aturan umum yang berlaku adalah (IAAO:127), apabila jumlah sampel paling sedikit 30 dan rasio dari *mean* terhadap *median* lebih dari 1,10 hal ini menunjukkan bahwa *over assessment* lebih serius dari *under assessment*. Namun apabila rasio dari *mean* terhadap *median* kurang dari 0,95 menunjukkan bahwa *under assessment* lebih serius dari *over assessment*.

2. Mean Ratio dibandingkan dengan Weighted Mean Ratio

Secara umum, *mean* harus lebih besar dari *weighted mean*. Perbandingan antara *mean* dengan *weighted mean* akan memberikan indikasi adanya regresifitas atau progresifitas dari penilaian. Regresifitas adalah suatu keadaan dimana properti-properti dengan nilai yang relatif tinggi telah dinilai dengan tingkatan yang lebih rendah daripada properti-properti dengan nilai yang relatif rendah. Sedangkan progresifitas adalah suatu keadaan dimana properti-properti dengan nilai yang relatif tinggi telah dinilai dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan properti-properti yang mempunyai nilai relatif rendah. Aturan umum yang berlaku adalah (IAAO:128) apabila jumlah sampel paling sedikit 30 (tiga puluh) dan rasio antara *mean* dengan *weighted mean* lebih dari 1,10 merupakan indikasi adanya regresifitas dalam hasil penilaian. Sebaliknya apabila jumlah sampel paling sedikit 30 (tiga puluh) dan rasio antara *mean* dengan *weighted mean* kurang dari

0,95 merupakan indikasi adanya progresifitas dalam hasil penilaian.

3. Median Ratio dibandingkan dengan Weighted Mean Ratio

Apabila *weighted mean assessment ratio* melebihi *median assessment ratio* maka terdapat indikasi bahwa kesalahan dalam *over assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *under assessment* dan terdapat elemen progresifitas dalam hasil penilaian. Sebaliknya apabila *weighted mean assessment ratio* lebih kecil dari *median assessment ratio* terdapat indikasi bahwa kesalahan dalam *under assessment* lebih besar dari kesalahan dalam *over assessment* dan terdapat elemen regresifitas dalam hasil penilaian.

PENGUKURAN VARIABILITAS ASSESSMENT RATIO

Pengukuran tendensi sentral hanya menunjukkan tingkatan secara umum hasil penilaian properti. Untuk melengkapi hasil analisis dengan tendensi sentral tersebut perlu dilakukan analisis variabilitas dari *assessment ratio*. Dua jenis pengukuran yang penting di dalam mengukur variabilitas *assessment ratio* adalah koefisien dispersi (*coefficient of dispersion*) dan koefisien variasi (*coefficient of variation*).

1. Koefisien Dispersi (*Coefficient of Dispersion = COD*)

Koefisien Dispersi merupakan ukuran keseragaman dengan menggunakan nilai *median assessment ratio*. Semakin rendah Koefisien Dispersi ini berarti semakin baik penentuan nilai yang dihasilkan. Dengan kata lain properti-properti yang serupa telah dinilai pada suatu tingkat akurasi yang relatif sama. Aturan umum sehubungan dengan tingkat Koefisien Dispersi (IAAO:129) adalah keseragaman penentuan nilai dapat dikatakan baik jika Koefisien Dispersi sama dengan atau kurang dari 15%.

Untuk menentukan Koefisien Dispersi dapat dilakukan melalui 6 (enam) langkah sebagai berikut:

- Hitung perbedaan setiap rasio dengan *median ratio*
- Tentukan nilai absolut dari setiap perbedaan tersebut
- Jumlahkan seluruh nilai absolut dari perbedaan tersebut
- Bagi jumlah seluruh nilai absolut dari perbedaan tersebut dengan jumlah observasi kurang satu untuk memperoleh deviasi rata-rata absolut
- Bagi deviasi rata-rata tersebut dengan *median assessment ratio*
- Kalikan dengan 100

2. Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation = COV*)

Koefisien Variasi merupakan ukuran keseragaman dengan menggunakan nilai *mean assessment ratio*. Semakin rendah Koefisien Variasi berarti semakin baik penentuan nilai yang dihasilkan. Dengan kata lain bahwa properti-properti yang serupa telah dinilai pada suatu tingkat akurasi yang relatif sama. Aturan umum sehubungan dengan tingkat Koefisien Variasi (IAAO:131) adalah bahwa keseragaman penentuan nilai dapat dikatakan baik apabila Koefisien Variasi sama dengan atau kurang dari 15%.

Untuk menentukan besarnya Koefisien Variasi dapat dilakukan melalui 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:

- Tentukan perbedaan antara setiap rasio dengan *mean ratio*
- Kuadratkan perbedaan-perbedaan tersebut
- Jumlahkan hasil pengkuadratan perbedaan-perbedaan tersebut
- Bagikan dengan jumlah observasi kurang satu
- Tentukan akar kuadrat untuk memperoleh deviasi standar dari rasio penilaian
- Bagi standar deviasi yang diperoleh dengan *mean assessment ratio*
- Kalikan dengan 100.

PENGUJIAN (TEST) TERHADAP NORMALITAS DARI ASSESSMENT RATIO

Apabila Koefisien Variasi digunakan sebagai alat ukur utama dari variabilitas penilaian, maka harus diadakan pengujian terhadap *assessment-assessment ratio* yang ada apakah distribusinya normal atau tidak. Apabila *assessment-assessment ratio* memiliki distribusi yang normal maka Koefisien Variasi menghasilkan suatu gambaran yang solid dan menyeluruh dari variabilitas penilaian. Sebaliknya, apabila *assessment-assessment ratio* tidak terdistribusi secara normal maka Koefisien Variasi akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Lebih jauh lagi kenormalan *assessment-assessment ratio* akan menentukan pilihan antara statistik parametrik atau non-parametrik di



Untuk melengkapi hasil analisis dengan tendensi sentral tersebut perlu dilakukan analisis variabilitas dari *assessment ratio*.

dalam menguji berbagai aspek dari performa penilaian.

Ada 2 (dua) jenis statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah *assessment-ratio* yang diperoleh terdistribusi secara normal atau tidak pada tingkat keyakinan (*confidence level*) tertentu. Pertama, Uji Binomial (*Binomial Test*) yang digunakan apabila jumlah *assessment ratio* (jumlah observasi) kurang dari 100. Selanjutnya adalah Uji Kai Kuadrat (*Chi-square Test*) apabila jumlah *assessment ratio* 100 atau lebih. Dalam setiap kasus ditentukan hipotesisnya yaitu:

- Ho : *Assessment ratio* terdistribusi secara normal
- H1 : *Assessment ratio* tidak terdistribusi secara normal

1. Uji Binomial (*Binomial Test*) untuk Kenormalan Distribusi

Di dalam Uji Binomial dibandingkan sejumlah observasi yang terdiri dari 2 (dua) kategori, dimana dalam masing-masing katagori diasumsikan bahwa hipotesa yang telah ditentukan adalah benar adanya. Apabila distribusi dari *assessment ratio* adalah normal, maka *mean assessment ratio* sama dengan *median assessment ratio*. Apabila sejumlah ratio yang terletak di bawah *mean ratio* mempunyai perbedaan yang tidak signifikan dengan ratio yang terletak di atas *mean ratio* pada tingkat keyakinan (*confidence level*) tertentu maka Ho dapat diterima dan *assessment ratio* terdistribusi secara normal.

Uji Binomial dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara tergantung kepada jumlah observasinya. Apabila jumlah observasi 25 atau kurang maka secara sederhana Uji Binomial dilakukan dengan mengevaluasi Tabel Probabilitas yang berhubungan dengan Uji Binomial tersebut.

Sebagai contoh, misalnya terdapat 20 (dua puluh) *assessment ratio* apakah telah terdistribusi secara normal pada tingkat kepercayaan 95%. 15 (lima belas) rasio berada di bawah *mean ratio* dan 5 (lima) rasio berada di atas *mean ratio*. Dengan melihat Tabel Probabilitas dan asumsi bahwa Ho benar hanya 0,021, maka Ho ditolak dan H1 diterima.

Apabila jumlah observasi lebih dari 25, Uji Binomial diaplikasikan dengan menggunakan formula nilai z (*z-value*) sebagai berikut:

$$z = \frac{0,5(n-1)-x}{\sqrt{(0,25n)}}$$

dimana n merupakan jumlah observasi dan x adalah rasio yang jumlahnya lebih sedikit dari dua kategori (di bawah atau di atas *mean ratio*). Hasil perhitungan z menurut formula tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel *z-value* pada tingkat keyakinan tertentu. Apabila hasil perhitungan tersebut tidak terletak pada area penolakan, maka Ho diterima yaitu *assessment ratio* telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Kai Kuadrat (*Chi Square Test*; χ^2)

Uji Binomial merupakan suatu

pengujian yang sangat baik untuk mendeteksi ketidaknormalan distribusi data apabila bentuk data tersebut condong ke kiri atau ke kanan (*skewed to the left or skewed to the right*). Namun apabila ketidaknormalan data tersebut dalam bentuk tinggi (*peak*) atau dalam bentuk menyebar (*domeshape*) maka Uji Binomial kurang pengaruhnya (*powerless*) karena dalam hal ini *mean ratio* tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan terhadap *median ratio*. Dalam hal ini maka Uji Kai Kuadrat merupakan alat pengujian yang lebih sesuai.

Uji Kai Kuadrat membandingkan sejumlah observasi yang dibagi atas 3 (tiga) atau lebih kategori dengan sejumlah observasi yang diharapkan terletak pada setiap kategori dengan asumsi tertentu. Sebagai contoh, misalnya terdapat 200 observasi yang dibagi atas 8 (delapan) kelas/kategori. Kemudian diasumsikan bahwa apabila distribusi data adalah normal maka 20% dari data terletak antara 0 dan +0,52 standar deviasi terhadap *mean ratio*, 15% terletak antara +0,52 dan +1,04 standar deviasi terhadap *mean ratio*, 10% terletak antara +1,04 dan +1,65 standar deviasi terhadap *mean ratio*, dan 5% terletak melebihi +1,65 standar deviasi terhadap *mean ratio*. Dari asumsi tersebut di atas kemudian hasilnya dibandingkan dengan data yang aktual. Apabila perbedaan data dalam asumsi terhadap data aktual sangat kecil pada tingkat keyakinan tertentu, maka Ho diterima yaitu distribusi data adalah normal.



Salah satu tujuan utama dari seorang penilai adalah memelihara agar tingkatan penilaian berada pada suatu persentase tertentu dari nilai pasar.

PENGUJIAN (TEST) TERHADAP TINGKATAN PENILAIAN (LEVEL OF ASSESSMENT)

Salah satu tujuan utama dari seorang penilai adalah memelihara agar tingkatan penilaian berada pada suatu persentase tertentu dari nilai pasar. Persentase ini biasanya ditentukan oleh pemegang otoritas kewenangan, apakah 90% atau 95% atau bahkan 100% dari nilai pasar. Dengan kata lain apakah nilai yang dihasilkan telah mencerminkan suatu nilai pasar dari objek yang dinilai. Untuk menguji tingkatan penilaian ini dapat digunakan 2 (dua) jenis pengujian yaitu: Parametrik Uji-t (*t-Test*) dan Non-Parametrik Uji Binomial.

1. Uji-t (*t-Test*) terhadap Tingkatan Penilaian (Level of Assessment)

Di dalam Uji-t ini, hipotesis yang digunakan adalah *mean ratio* dari penilaian terhadap nilai kas sebenarnya sebesar 100% dengan bentuk hipotesis:

$$\begin{aligned} H_0: & \frac{A}{V} = 1,000 \\ H_1: & \frac{A}{V} \neq 1,000 \end{aligned}$$

Perlu diperhatikan bahwa hipotesis alternatif, H_1 , merupakan uji dua pihak (*two-tailed test*), atau dengan kata lain penilai harus menolak H_0 apabila tingkatan penilaian di atas atau di bawah rasio yang ditetapkan secara hukum. Namun apabila penilai menginginkan pengujian khusus dimana tingkatan penilaian paling tidak sama dengan rasio yang ditetapkan secara hukum, maka hipotesis alternatif, H_1 , harus uji satu pihak (*one-tailed test*) yaitu:

$$H_1: \frac{A}{V} < 1,000$$

Uji-t ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Hitung *mean* dan Standar Deviasi dari *assessment ratio*.
 2. Kurangkan *mean* populasi hipotesis dari *mean assessment ratio*
 3. Bagi hasil pengurangan tersebut pada nomor 2 dengan standar deviasi
 4. Kalikan dengan akar pangkat dua dari jumlah observasi
- Keseluruhan langkah-langkah terse-

but di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{\frac{A}{S} - \frac{A}{V}}{s/\sqrt{n}}$$

dimana A/S merupakan *mean ratio*, A/V adalah *Mean Populasi Hipotesis*, s merupakan standar deviasi dari *assessment ratio*, sedangkan n menunjukkan jumlah observasi. Hasil perhitungan t sesuai formula di atas kemudian dibandingkan dengan t yang ada di dalam tabel statistik (*t-table*) dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) tertentu dimana besarnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar jumlah observasi dikurangi satu ($n-1$). Dari tabel t tersebut dapat diketahui apakah t -hitung berada pada area penolakan atau tidak. Apabila t -hitung tidak berada pada area penolakan maka penilai tidak dapat menerima hipotesis alternatif H_1 dan secara rata-rata properti telah dinilai sama dengan nilai pasar.

2. Uji Binomial terhadap Tingkatan Penilaian (Level of Assessment)

Dalam pendekatan non-parametrik untuk menguji tingkatan penilaian hipotesis yang dipergunakan adalah bahwa *median ratio* dari penilaian merupakan persentase tertentu dari nilai pasar sebenarnya. Alat uji yang sesuai adalah Uji Binomial. Pada test ini, secara statistik pada tingkat kepercayaan tertentu, diuji apakah separuh dari observasi berada di bawah nilai pasar (1,000) dan separuh lagi di atas nilai pasar.

Apabila jumlah observasi 25 (dua puluh lima) atau kurang, maka Uji Binomial untuk menguji tingkatan penilaian secara sederhana dilakukan dengan menghitung sejumlah rasio yang berada di atas dan di bawah *median ratio* yang hipotesis dan mengevaluasi kemungkinan distribusi observasinya dengan menggunakan tabel probabilitas yang berhubungan dengan Uji Binomial. Sebagai contoh, misalnya pada tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95% apakah *median ratio* dari tingkatan penilaian suatu kelompok properti yang telah dinilai paling sedikit 50%. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} H_0: & \frac{A}{V} = 0,50 \\ H_1: & \frac{A}{V} < 0,50 \end{aligned}$$

Dalam menganalisis 22 (dua puluh dua) nilai pasar misalnya terdapat 15 *assessment ratio* yang kurang dari 0,50 dan terdapat 7 *assessment ratio* yang lebih dari 0,50. Dengan melihat tabel probabilitas dan distribusi, *assessment* tersebut merupakan *one-tailed test* di bawah asumsi bahwa H_0 adalah benar: $0,50(0,067) = 0,0335$, sehingga H_0 ditolak dengan kesimpulan bahwa tingkatan penilaian berdasarkan *median* adalah kurang dari 0,50.

Apabila jumlah observasi lebih besar dari 25 (dua puluh lima), maka Uji Binomial dilakukan dengan menghitung besarnya nilai z (*z-value*) dengan menggunakan rumus:

$$z = \frac{0,5(n-1) - x}{\sqrt{(0,25n)}}$$

Dimana n sama dengan jumlah total rasio dari observasi dan x adalah jumlah rasio yang lebih kecil.

Sebagai contoh, terdapat 30 (tiga puluh) *assessment ratio* yang akan diuji dengan Uji Binomial. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} H_0: & \frac{A}{V} = 1,000 \\ H_1: & \frac{A}{V} \neq 1,000 \end{aligned}$$

Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat 20 rasio yang kurang dari 1,000 dan terdapat 10 rasio lebih dari 1,000. Apabila dimasukkan ke dalam rumus di atas maka,

$$z = \frac{0,5(29) - 10}{\sqrt{(0,25)(30)}} = 1,64$$

Nilai z yang dihasilkan dari rumus tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai z menurut tabel- z . Pada tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan *two-tailed test*, maka nilai z berdasarkan tabel- z adalah $\pm 1,96$. Karena hasil rumus z berada pada 1,64 atau dengan kata lain z -hitung tidak berada pada area penolakan maka H_0 diterima atau penilaian terhadap objek penelitian telah sama dengan atau mendekati nilai pasar.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



Foto : Gathot Subroto

Melihat Cara Pandang Orang Terhadap Pekerjaannya

OLEH: SUPRIYANTO

Pendahuluan

Pindahannya perasaan waktu kita pertama kali mendapatkan pekerjaan. Masa menuntut ilmu di bangku sekolah dan perguruan tinggi menjadi sangat bermakna ketika kita dikenal menjadi orang telah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu bisa jadi sesuai dengan disiplin ilmu yang kita tekuni di saat menimba ilmu. Sebagian orang mendapatkan pekerjaan yang di luar ilmu yang dikuasainya. Tidak sedikit juga orang yang mencari dan kemudian mendapatkan pekerjaan untuk

menyambung hidupnya. Apapun bentuk dan bagaimana pekerjaan itu akan berkaitan dengan kondisi kenyamanan hati. Kenyamanan hati dalam melakukan pekerjaan menjadi berbeda-beda disebabkan kepuasan kita terhadap penghasilan, jenis pekerjaan, tempat kerja, fasilitas yang diperoleh maupun alasan-alasan lain.

Dalam perjalanan hidup kita, terdapat paling tidak dua pandangan terhadap pekerjaan yang kita peroleh. Pandangan

pertama menganggap pekerjaan sebagai bagian dari nasib yang digariskan bagi kita. Dalam pandangan mereka, pekerjaan itu bagaimanapun diusahakan akan memberikan hasil hanya sebatas apa yang ditentukan buahnya.

Pandangan kedua melihat hidup sebagai pilihan bebas. Seperti halnya kita menempuh perjalanan, kita diberikan sebuah peta menuju suatu tempat. Dalam peta perjalanan tersebut ditemui banyak pilihan, begitu banyak orang untuk ditemui, begitu banyak hal dapat dipelajari, dan begitu banyak pekerjaan untuk dilakukan. Pilihan-pilihan tersebut sering diakhiri dengan kenyataan kita tidak belajar apapun, tidak mendapatkan informasi penting dari orang yang kita temui, serta melewatkan pekerjaan dengan tidak mengerjakan apapun. Sebenarnya pilihan itu menyajikan jalan yang panjang dan landai, atau pilihan lainnya adalah jalan terjal tetapi hanya butuh waktu yang sedikit untuk mencapainya.

Kedua pandangan tersebut di atas melihat pekerjaan dengan cara yang berbeda. Pandangan pertama lebih pasrah (kalau tidak mau dibalang pesimis) menghadapi hidup. Sedangkan pandangan kedua melihat kondisi dengan persepsi yang lebih memberikan pilihan. Dalam pandangan kelompok kedua ini pekerjaan juga dapat disikapi dengan berbagai macam cara pandang.

Dalam bukunya yang berjudul *I Love Monday*, Arvan Pradiansyah menjelaskan terdapat tiga cara pandang/paradigma tersebut di atas. Hal ini diarahkan untuk dapat mengerti rendahnya semangat dan produktivitas kerja terkait dengan paradigma, bukan masalah perilaku. Menurut penulis, paradigma merupakan sebab dan perilaku merupakan akibat. Ketiga paradigma tersebut adalah paradigma yang berorientasi pada *job*, *career* atau *calling*. *Calling* ini diistilahkan oleh banyak penulis lainnya sebagai *vocation*.

Job, career and calling (vocation)

Untuk dapat memandang cara pandang orang terhadap pekerjaannya, marilah kita ulas ketiga paradigma tersebut. Paradigma pertama lebih berorientasi

pada *job*. Pemilik usaha, pemberi pekerjaan, majikan, atasan diibaratkan sebagai seorang sutradara. Sutradara ini yang mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh pekerja. Orang sebagai pelaku pekerjaan dapat merasa tersiksa karena menjalankan skenario, visi dan misi, cita-cita, obsesi serta masa depan sang sutradara. Mengapa jika ia merasa tersiksa tetapi tetap melakukan pekerjaan? Terdapat beberapa motivasi penggerak dalam jangka pendek yaitu apa yang akan saya peroleh dari melakukan pekerjaan itu, berharap sang sutradara menyukainya sehingga diberi kesempatan untuk tetap bekerja, atau sebagai status sosial agar dilihat orang sebagai pekerja keras.

Dalam paradigma pertama ini janganlah kita membayangkan hanya pekerja kasar, buruh bangunan, penjaga toko maupun pembantu rumah tangga kita saja. Dalam kategori ini dapat juga terdapat para profesional, pekerja terlatih, bahkan aparatur negara. Mereka bekerja semata-mata untuk menafkahi keluarga dan bertahan hidup. Tidak ada pilihan lain untuk dapat menghidupi keluarga selain memperoleh penghasilan sebagai kompensasi pekerjaan yang telah dilakukannya. Akibatnya adalah mereka memiliki perilaku yang cenderung tidak memedulikan kesehatan dan memanfaatkan waktu sebanyak mungkin agar hasil yang diperoleh juga lebih banyak.

Orang yang berorientasi pada *job* ini cenderung bekerja seperti robot. Mereka memiliki semangat kerja sebagaimana model *get the job done* (GJD), yaitu sekadar menjalani rutinitas kerja yang monoton. Di kantor, kita dapat menemui penganut aliran ini. Mudah sekali mengenalinya yaitu apabila terdapat karyawan yang secara fisik berada di kantor, namun pikirannya berkelana kemana-mana. Mereka tidak fokus pada pekerjaannya, yang penting tugas saya sudah saya selesaikan. Jangan sampai sang sutradara menjadi kecewa atas pekerjaan kita sehingga takut jika berbuat kesalahan. Prinsip menara gading atau ABS (asal bapak senang) juga mewarnai pelaksanaan pekerjaannya. Begitulah pandangan mereka.

GJD ini membuat perasaan karyawan atau pekerja tidak nyaman. Mereka terpaksa bertahan dalam pekerjaannya saat ini yang dirasakan membosankan. Bosan karena menganggap pekerjaan itu merendahkan dirinya atau karena jenis pekerjaannya dirasakan tidak sesuai dengan minat dan keahliannya. Tidak ada hal lain yang dipikirkan hanyalah tentang apa yang diperolehnya.

Paradigma kedua berorientasi pada karir (*career*). Apabila pada paradigma pertama (*job*) motivasinya adalah apa yang saya peroleh, dalam paradigma kedua ini motivasinya adalah bagaimana cara saya memperolehnya. Mereka menyusun sendiri strategi dan pencapaian pekerjaannya. Menurut mereka, pekerjaan itu merupakan satu-satunya cara untuk bertumbuh. Skenario paradigma *career* ini dibuat oleh diri sendiri, tidak seperti pada paradigma *job* yang masih dibuat oleh orang lain skenarionya. Mereka percaya dengan karir maka orang akan sukses mendapatkan uang lebih banyak, atau pengetahuan dan ketrampilan serta pengalaman yang lebih. Tujuan penganut paradigma ini adalah kesuksesan.

Demikian juga dengan manfaat dari pekerjaan, para penganut paradigma kedua ini memikirkan manfaat jangka panjang. Kalau dalam paradigma pertama



Sumber: valensianyangela.blogspot.com



kita hanya memikirkan gaji atau manfaat jangka pendek (saat ini), paradigma yang berorientasi *career* ini rela berkorban untuk mendapatkan manfaat walaupun dalam jangka panjang. Cassie mengatakan pendapatnya tentang *career* ini sebagai berikut: *Working in your career field, you will be willing to make short term sacrifices for long term benefits.*

Dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor, kita bisa melihat orang yang peduli terhadap tempat kerjanya serta mempersiapkan pencapaian lebih lanjut dengan mengerahkan hampir seluruh energinya. Kebanyakan dari mereka berhasil meraih kesuksesan. Contoh sederhana adalah ketika seorang pelaksana bersedia menjalani mutasi di kota yang kecil, meninggalkan keluarganya dan bekerja dengan baik. Pelaksana tersebut memahami pengorbanannya saat ini diperlukan untuk dapat mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi lagi. Energinya dicurahkan dalam pekerjaannya dengan harapan suatu ketika ia akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari sekarang. Ia menciptakan strategi untuk kesuksesan dalam jangka panjang. Bagaimana cara memperoleh kesuksesan itu? Terdapat pilihan strategi yang dapat ia buat agar dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan di kemudian hari. Inilah ciri orang yang berorientasi pada *career*.

Mari kita lihat pada kedua paradigma tersebut di atas. Terdapat kesamaan tujuan pada keduanya yaitu “memperoleh”. Paradigma pertama berorientasi pada “apa yang diperoleh” sedangkan paradigma kedua pada “bagaimana cara memperoleh”. Inti dari keduanya adalah sesuatu yang diterima (dari pihak luar)

kepada kita dengan cara bekerja.

Paradigma ketiga adalah orang yang tidak lagi menjalankan skenario diri sendiri maupun orang lain, melainkan sudah menjalankan skenario Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang memiliki paradigma seperti ini tidaklah banyak. Menurut penelitian di amerika yang dirujuk oleh Arvan Pradiansyah, yaitu berdasarkan konferensi sumber daya manusia yaitu *American Society for Training and Development (ASTD)*, menunjukkan bahwa orang yang memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya hanyalah 29%. Mereka inilah yang memfokuskan pandangannya bukan pada yang diterima atau diperolehnya, tetapi pada memberi dan melepas (*confirm satisfaction*). Sementara itu terdapat 54% orang yang secara fisik ada di kantor tetapi energi, passion, dan perhatiannya bukan untuk pekerjaan. Parahnya lagi selebihnya (17%) justru membenci pekerjaannya dan menyebarkan isu yang menggerogoti tempat kerjanya.

Paradigma yang merupakan *confirm satisfaction* ditandai dengan adanya pergeseran *mindset* dari berfokus pada diri sendiri demi gaji atau karir menjadi *altruistic* yaitu bekerja sebagai ibadah. Pandangan orang dengan fokus pada melepas atau memberi ini melihat pekerjaan sebagai sebuah panggilan (*calling/vocation*). Orientasi pekerjaan yang dilakukan bukanlah pada apa yang akan diperoleh melainkan bekerja semata-mata melayani orang lain agar dapat mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi (*finding God in all things*).

Dalam bahasa Jawa kita sering mendengar hal ini dengan istilah *sepi ing pamrih, rame ing gawe*. *Sepi ing pamrih* merupakan filosofi Jawa yang mengajarkan agar dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan tulus, tidak berharap sesuatu. Sesuatu itu bisa dalam bentuk materi atau bahkan sebuah pujian. Segala yang dilakukannya berdasarkan kasih terhadap sesama. Jiwa pelayanan ada dalam setiap perbuatannya. Ia melakukan pekerjaan dengan menggunakan hati didasari oleh rasa senang melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan *rame ing*

gawe memiliki arti orang lebih banyak berbuat atau melayani. Lebih produktif dan produktivitas itu harus berkualitas. Indikatornya dapat berupa indeks kepuasan pelanggan atau pengukuran lainnya. Ukuran keberhasilan pekerjaan itu telah dilakukan dengan baik bukan berfokus pada diri sendiri, melainkan fokus pada kepuasan pelanggan.

Bagaimana dengan kita memandang pekerjaan kita? Apakah kita butuh pekerjaan karena berorientasi pada apa yang akan kita peroleh baik saat ini atau dalam jangka panjang? Ataukah kita melakukan pekerjaan untuk membuat pelanggan puas dan melakukan pekerjaan sebagai ibadah, mencari Tuhan dalam segala hal? Ada baiknya kita coba tes sederhana di bawah ini. Tes ini merupakan tes yang dirujuk oleh Sarah Cooper dari penelitian Amy Wrzenznikwski dengan sedikit penyesuaian.

Penutup

Dimanakah posisi kita, orang yang memiliki cara pandang *job, career* ataukah *calling/vocation*? Perasaan nyaman dalam pekerjaan kita akan membentuk perilaku kita dalam bekerja. Apabila *job* itu dimaksudkan untuk sekedar *survival* dan *career* ini lebih identik dengan kesuksesan, maka *calling/vocation* menggambarkan kebahagiaan. Orang yang sudah tidak berorientasi pada materi atau pujian serta jenjang kesuksesan, ia telah memiliki cara pandang *calling/vocation*. Perilakunya tentu saja sudah sangat berbeda dengan pemilik paradigma *job dan career*. Marilah kita pertahankan apabila sudah memiliki cara pandang *calling/vocation*. Apabila kita masih berorientasi *job dan career*, marilah kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan. Pada tataran ini maka Nilai-nilai Kementerian Keuangan telah dapat diimplementasikan dengan tepat. Selamat berkarya dengan hati melakukan semua pekerjaan kita hanya semata-mata untuk beribadah demi Kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

DISCLAIMER

ADVERSE

QUALIFIED

UNQUALIFIED

Ilustrasi: V.M.I Bimo Adi

PERKEMBANGAN OPINI LKPP

OLEH: ANDI P. HAMZAH

Pengantar

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2012 ini, setiap instansi pemerintah dari tingkat Kementerian/Lembaga sampai dengan tingkat satuan kerja mulai disibukkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga merupakan pengejawantahan dari transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, maka dilakukannya pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Apakah target tersebut akan berhasil di-

capai di tahun 2012 ini? Ada baiknya apabila kita menengok LKPP yang lalu dan memahami permasalahan-permasalahannya.

Jika menilik laporan keuangan pemerintah tiga tahun terakhir, secara garis besar menunjukkan adanya peningkatan opini di tiap kementerian/lembaga dari tahun 2009-2011. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1 Peningkatan Opini WTP K/L 2009-2011.

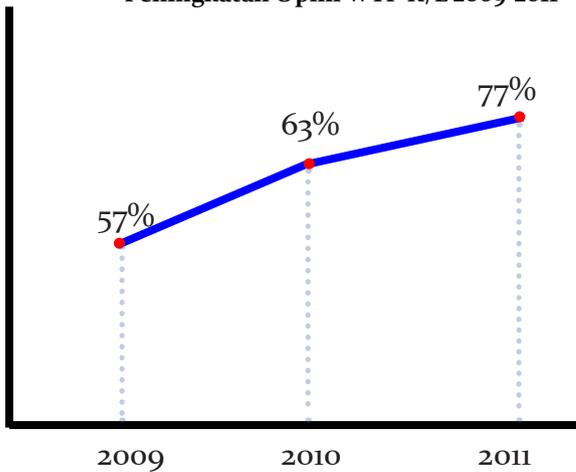
Selama kurun waktu 3 tahun ini, yaitu 2011, 2010, dan 2009, BPK memberikan opini LKPP Wajar dengan Pengecualian. Sedangkan untuk LKPP sebelum tahun 2009 lima tahun berturut-turut diberikan opini tidak memberikan pendapat (Disclaimer). Perkembangan opini K/L Tahun 2009-2011 secara lebih detil dapat dilihat pada Grafik 2.

Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2011 jumlah

entitas pelaporan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian meningkat dari 45 entitas pelaporan menjadi 67 entitas pelaporan. Dan hanya 2 entitas pelaporan yang mendapat *disclaimer opinion*. Hal ini menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sehingga meningkatkan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Khusus untuk Kementerian Keuangan, tahun 2011 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah dua tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini memberikan bukti bahwa Kementerian Keuangan sebagai pionir di bidang reformasi birokrasi senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas public atas pengelolaan keuangannya.

Grafik 1
Peningkatan Opini WTP K/L 2009-2011



Apa itu Opini dan apa Kriteria Pemberian Opini?

Menurut UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diberikan definisi tentang Opini yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam penjelasan pasal 16 ayat 1 UU No 15 Tahun 2004, juga disebutkan macam opini dan kriteria pemberian opini.

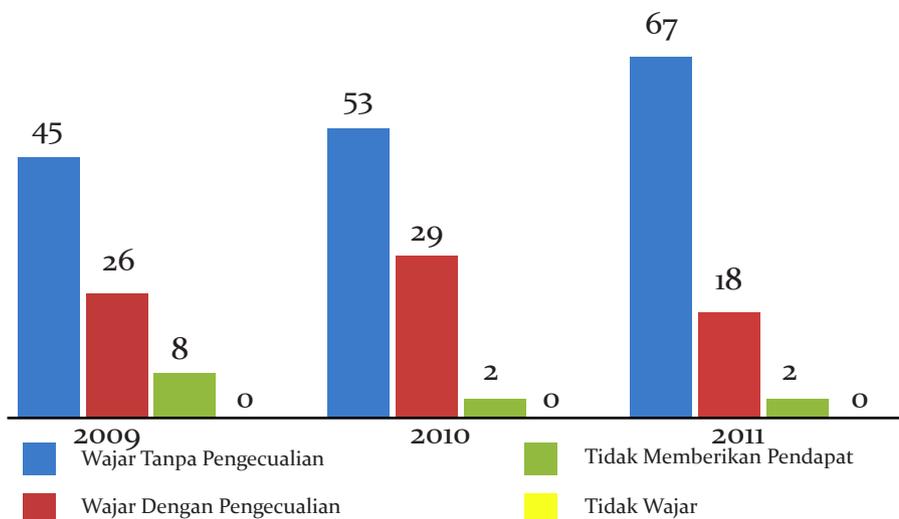
Opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(*Unqualified Opinion*). Diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar untuk semua hal yang material.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar untuk semua hal yang material kecuali pos tertentu.
3. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Diberikan opini Tidak wajar apabila laporan keuangan disajikan dan diungkapkan secara tidak wajar untuk semua hal yang material.

Grafik 2
Perkembangan Opini K/L 2009-2011



4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan menolak memberikan opini diberikan apabila laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan.

Kriteria pemberian opini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 16 ayat 1 meliputi 4 hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kriteria untuk menentukan kewajaran atas laporan keuangan didasarkan atas kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidaktepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern dinilai memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian sehingga diperoleh keyakinan bahwa tujuan penyelenggaraan Negara dapat tercapai secara efektif dan efisien dan tercermin pula dalam laporan keuangan bahwa bebas dari salah saji material.

Permasalahan di LKPP 2011

Meskipun terjadi peningkatan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat, namun masih terdapat pengecualian karena adanya beberapa permasalahan yang masih terdapat di LKPP 2011 ini. Berdasarkan siaran pers yang disampaikan oleh BPK, terdapat 2 permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2011. Hal inilah yang menjadikan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2011. Terkait dengan kriteria pemberian opini, permasalahan

ini berkaitan dengan kesesuaian LKPP dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan. Dua permasalahan tersebut yaitu:

1. Terdapatnya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap.
2. Terdapatnya kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan.

Untuk permasalahan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap, meliputi:

1. Belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian atas aset tetap di 10 kementerian/lembaga dengan nilai perolehan Rp4,13 Triliun;
2. Belum selesainya inventarisasi dan penilaian atas aset tetap berupa tanah jalan nasional pada kementerian pekerjaan umum senilai Rp109,06 triliun;
3. Pencatatan ganda atas aset tetap hasil inventarisasi dan penilaian pada 3 kementerian/lembaga senilai Rp3,88 triliun
4. Terdapat selisih antara pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian pada 40 kementerian/lembaga dengan nilai koreksi hasil inventarisasi dan penilaian oleh DJKN sebesar Rp1,54 triliun
5. Tidak diketahui keberadaannya atas aset tetap pada 14 kementerian/lembaga senilai Rp6,89 triliun
6. Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap karena pelaksanaan inventarisasi dan penilaian belum mencakup penilaian masa manfaat aset tetap. Jika hal ini dilakukan, maka akan terjadi perubahan nilai aset tetap yang dilaporkan, secara signifikan.

Sementara itu, permasalahan kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi,

perhitungan, dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi:

1. Belum ditemukannya dokumen *cessie* atas Aset Eks BPPN berupa aset kredit senilai Rp18,25 triliun;
2. Tidak adanya dukungan dokumen sumber yang valid atas Aset eks BPPN senilai Rp11,18 triliun yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
3. Belum didukungnya kesepakatan dengan pemegang saham Aset eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp8,68 triliun;
4. Belum dinilainya aset eks BPPN berupa aset property sebanyak 917 item;
5. Belum dapat disajikannya nilai bersih yang dapat direalisasikan atas aset eks BPPN berupa Piutang.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers BPK, terkait dengan kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat permasalahan yang masih terdapat dalam LKPP 2011 yaitu:

1. Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlambat/belum disetorkan ke kas Negara, kurang/belum dipungut, digunakan langsung diluar mekanisme APBN, dan dipungut melebihi tarif PP;
2. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas atas areal onshore tidak sesuai dengan Undang Undang PBB dan Undang Undang Migas;
3. Terdapat perbedaan realisasi pendapatan hibah antara LKPP dengan LK Bagian Anggaran (BA) pengelolaan hibah yang tidak dapat dijelaskan dan penerimaan hibah langsung KL belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara (BUN) dan dikelola di luar mekanisme APBN;
4. Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan 7 perguruan tinggi yang telah dibatalkan status Badan Hukum Pendidikan (BHP) nya;

5. Penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Perum Jamkindo atas Risk Sharing tunggakan Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan (KUT TP) 1998/1999 pola channeling berlarut-larut.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Selanjutnya terkait kriteria efektivitas sistem pengendalian intern, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas;
2. Tidak optimalnya pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas;
3. Terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap;
4. Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian atas aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (AKKKS);
5. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid;
6. Penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut dan penetapannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) dapat berbeda dengan penyerahan awal;
7. Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya dalam LKPP belum diatur secara konsisten dan komprehensif;
8. Terdapat selisih nilai sisa anggaran lebih tahun 2011 antara fisik dengan catatannya.

Beberapa kelemahan/permasalahan yang muncul dalam LKPP 2011 menjadi hal yang penting guna ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Hal ini akan mendorong tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan diharapkan tidak akan ditemukan masalah yang sama di LKPP selanjutnya.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



Sumber: <http://3oneseven.com>

Waspadai

STROKE!

OLEH: dr. EDUARD TAMBUNAN

Mendengar kata 'stroke', kebanyakan dari kita menganggapnya bukanlah kata yang asing di telinga. Stroke merupakan suatu kelainan fokal di jaringan otak yang diakibatkan adanya gangguan suplai darah ke otak karena *iskemia* atau *hemoragi*. Akibatnya timbul defisit neu-

rologis berupa gangguan motorik, sensorik dan neurobehavior. Sampai saat ini stroke merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan kematian dan kecacatan yang cukup tinggi. Di Amerika Serikat, stroke berada di posisi ketiga setelah penyakit jantung dan kanker sebagai penyebab kematian dan menempati ranking pertama sebagai penyebab kecacatan

di Amerika Serikat. Di Indonesia, stroke merupakan penyebab kecacatan yang paling tinggi di usia 40 tahun keatas.

Otak adalah organ yang sangat mutlak memerlukan pasokan oksigen dan glukosa dari luar, karena otak tidak dapat menyimpan glukosa seperti misalnya otot dan jaringan lemak. Pasokan glukosa dan oksigen dilakukan melalui pembuluh darah. Otak masih dapat berfungsi dengan baik bila penyediaan oksig-

gen kurang dari 10 detik. Dan akan fatal bila terjadi gangguan lebih dari 3 menit dimana jaringan otak akan mengalami gangguan yang bersifat *irreversible* (tidak dapat pulih seperti sediakala). Berbeda pada gangguan glukosa, bila gangguan atau kekurangan glukosa tidak lebih dari 60 menit kerusakan otak masih bersifat *reversible* (pulih seperti sediakala).

Klasifikasi Stroke

Stroke sendiri dapat dibeda-bedakan berdasarkan patologi anatomi, waktu terjadinya, dan sistem pembuluh darah. Berdasarkan patologi anatomi dan kerusakan pembuluh darah dan jaringan otak, stroke dibagi menjadi :

- a. Stroke Iskemik
 - *Transient Ischemic Attack* (TIA)
 - Trombosis Serebri
 - Emboli Serebri
- b. Stroke Haemorigic
 - *Transient Ischemic Attack* (TIA)
 - Perdarahan Intra Serebral
 - Perdarahan *Subarachnoid*

Sementara itu, berdasarkan waktu terjadinya terdapat *Transient Ischemic Attack* (TIA), *Stroke in Evolution*, *Completed Stroke*. Berdasarkan sistem pembuluh darah, ada sistem *karotis* dan sistem *vertebro-basiler*.

Gejala dan Tanda Stroke

Gejala stroke bisa dibedakan atas gejala/tanda akibat lesi di otak dan gejala/tanda yang diakibatkan oleh komplikasinya. Gejala akibat lesi bisa sangat jelas dan mudah untuk didiagnosis, akan tetapi bisa sedemikian tidak jelas sehingga diperlukan kecermatan yang tinggi untuk mengenalinya. Pasien bisa datang dalam keadaan sadar dengan keluhan lemah separuh badan pada saat bangun tidur atau sedang bekerja. Tampilan gejala yang timbul secara umum tidak dapat dibedakan karena penyumbatan atau perdarahan, kecuali pada jenis perdarahan seringkali disertai dengan nyeri kepala yang hebat, utamanya bila kejadian terjadi saat bekerja, akan tetapi tidak jarang penderita dibawa kerumah sakit dalam keadaan koma sehingga dokter harus disingkirkan dahulu kemungkinan

penyakit yang lain (*differensial diagnosis*). Secara umum gejala yang terjadi tergantung pada besar dan letak gangguan yang terjadi di otak, yang menyebabkan gejala dan tanda organ yang dipersyarafi oleh bagian tersebut.

Tanda-tanda penyakit stroke yang dapat terlihat antara lain adalah:

1. Wajah tampak mencong sebelah atau tampak tidak simetris;
2. Ketika mengangkat tangan lurus kedepan dengan telapak menghadap keatas selama 30 detik, jika terjadi kelumpuhan maka tanpa disadari tangan yang menderita lumpuh akan turun;
3. Bicara pelo;
4. Gangguan keseimbangan, merasa berputar, rasa kesemutan pada separuh anggota badan sampai kehilangan kesadaran.

Yang Berisiko Terserang Stroke

Beberapa faktor seseorang dapat terserang stroke, yaitu tekanan darah tinggi, kadar kolesterol darah yang tinggi, kegemukan (*obesitas*), *diabetes mellitus*, merokok, alkohol, stres serta pola hidup yang tidak sehat. Faktor-faktor ini dapat diubah atau dikendalikan oleh penderita.

Sementara itu, faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan oleh penderita meliputi:

- Usia. Stroke banyak terjadi pada orang usia lanjut yaitu usia diatas 50 tahun, walaupun ada yang terserang pada usia muda ini diakibatkan oleh pola dan gaya hidup tidak sehat (kurang olah raga, merokok, konsumsi makanan tinggi lemak, konsumsi makanan rendah serat dan stres yang tinggi).
- Jenis kelamin. Pada wanita yang belum memasuki menopause kadar hormon estrogen membantu melindungi pembuluh darah dari pembentukan penumpukan plak, sehingga kemungkinan terjadinya stroke lebih kecil pada wanita pada usia dibawah 55 tahun.
- Orang yang pernah terkena stroke, berpotensi lebih besar untuk ter-

jadinya stroke berulang, bila tidak terkontrol dengan baik.

- Orang yang mempunyai kelainan pembuluh darah (*aneurisma*).
- Faktor genetik atau keturunan stroke pada keluarga.

Pencegahan Stroke

Stroke dapat dicegah dengan mengubah gaya dan pola hidup serta mengontrol faktor resiko yang ada. **Pencegahan primer** yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terkena stroke meliputi:

1. Menghentikan kebiasaan merokok.
2. Menjaga berat badan pada ukuran yang ideal.
3. Mengonsumsi makanan yang sehat , rendah lemak dan banyak serat.
4. Melakukan olah raga teratur dan cukup.
5. Memeriksa kadar kolesterol dan gula darah dan mempertahankan dalam keadaan normal.
6. Mengontrol tekanan darah pada 120 / 80 mmHg.

Pencegahan sekunder yaitu pada orang yang pernah terkena stroke agar tidak berulang, mencakup:

1. Mengendalikan tekanan darah, kadar kolesterol , gula darah, asam urat.
2. Mengubah pola dan gaya hidup.
3. Meminum obat dengan teratur sesuai dosis dan frekuensi yang dianjurkan.

Simpulan

Otak merupakan organ tubuh yang sangat mutlak memerlukan pasokan oksigen dan glukosa dari luar, dan otak tidak dapat menyimpan glukosa. Faktor kunci agar pasokan oksigen dan glukosa ke otak adalah kondisi pembuluh darah yang sehat. Pasokan melalui pembuluh darah akan sangat terganggu pada pasien hipertensi dan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Oleh karenanya, sangat penting untuk mencegah serangan stroke dengan menjalani pola hidup yang sehat.

*Penulis adalah Dokter pada Sekretariat BPPK

Diklat Teknis Fungsional

PEMERIKSA PAJAK MENENGAH

Sumber Foto: Dokumentasi Pusdiklat Pajak



Diklat Teknis Fungsional Pemeriksa Pajak Menengah

Pemeriksa pajak merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menguji kepatuhan wajib pajak. Kebutuhan DJP akan kompetensi pemeriksa ini tidak hanya dengan penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan pemeriksaan, produk pemeriksaan yang dihasilkan, tetapi yang terutama adalah kompetensi SDM yang mampu menjalankan semua fungsi dalam perundangan tersebut.

Melihat kebutuhan DJP tersebut, Pusdiklat Pajak menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional Pemeriksa Pajak Menengah. Materi yang diajarkan terfokus pada penguasaan teknik pemeriksaan tingkat menengah (*middle technical audit skills*), *critical analysis* atas pelaksanaan, penguasaan proses bisnis wajib pajak, komunikasi dengan wajib pajak, dan studi kasus. Diklat ini diharapkan mampu memberikan kemampuan audit dan analisis Fungsional

Pemeriksa dalam menghadapi kasus-kasus pemeriksaan pajak atau transaksi yang diatur secara khusus. Selama 2 minggu peserta diklat yang merupakan pejabat fungsional dari berbagai kantor pelayanan pajak di beberapa wilayah di Indonesia mengikuti diklat ini.

Beberapa peserta diklat, yaitu: Sapto Widodo dari KPP Perusahaan Masuk Bursa, Butet Mega Ferawati dari KPP Perusahaan Modal Asing II dan Muhamad Nur Puguh dari KPP Madya Medan, berbagi cerita seputar pengalaman mereka mengikuti diklat ini.

Bagaimana rasanya saat mengikuti diklat ini?

Sapto Widodo (SW): “Perasaannya ya senang karena pasti akan ada wawasan yang didapat. Lalu, *update* peraturan terkini. Selain itu, kita ketemu teman-teman dari kantor-kantor seluruh Indonesia, kita *sharing* pengalaman. Karena meskipun sudah bekerja 20 tahun, misalnya dia di Jawa saja dan belum pernah memeriksa perkebunan, pengetahuan seperti itu kan bisa didapat dari pengalaman teman-teman lain.”

Butet Mega Ferawati (BMF): “Kalau saya senang karena untuk memperbaharui dan *refresh* pengetahuan juga. Kalau kita mengambil kursus di luar *kan* bayarnya lebih mahal *ya*, sedangkan diklat ini *kan* kita dibiayai kantor atau negara. Manfaatnya untuk *update* peraturan dan mungkin tata cara pemeriksaan. Bertemu teman-teman karena melalui teman selama diklat bisa *sharing* pengalaman, belum tentu pengalaman kita sama, ada teman yang pengalamannya 10 atau 20 tahun, kita yang 2 atau 3 tahun belum mengalami pengalaman itu.”

Muhamad Nur Puguh (MNP): “Jelas senang sekali, kita ban-



yak *sharing* pengalaman dan pasti juga banyak sisi lain yang mungkin di luar dari pembelajaran. Banyak juga sisi yang belum kita buka sewaktu bekerja, namun saat kita mengikuti diklat ini diingatkan bahwa ada yang seperti ini dan ternyata kita belum pernah coba yang seperti ini.”

Bagaimana dengan harapan sebelum dan sesudah mengikuti diklat, sudah sesuai dengan bayangan dan harapan sebelum mengikuti diklat?

BMF : “Sebelum diklat, sewaktu pemanggilan memang tujuannya untuk menambah pengetahuan dari yang saya punya. Selama ini kan di kantor IHT-IHT (*Internal House Training-red*) saja, kalau ini kan terangkum secara keseluruhan, jadi menurut saya sudah cocok. Pelajaran yang diberikan juga bagus.”

SW : “Materinya adalah semua yang dapat membantu kita dalam pelaksanaan tugas. Juga studi kasus yang sangat membantu saat kita bekerja di lapangan.”

MNP : “Kalau dari sisi saya, dari sisi pelaksanaan, mohon undangan tidak terlalu mepet, terutama untuk yang di luar Jawa. Teman-teman di lapangan kan ada pekerjaan yang jatuh tempo dan lain sebagainya. Ketika menerima undangan hari Kamis, Senin harus ke Jakarta, bagaimana menyusun pekerjaan itulah yang menjadi masalah. Akhirnya ada sebagian teman yang menunda ikut atau digantikan dan lain-lain. Sebenarnya mereka ingin ikut, cuma karena faktor pekerjaan tidak memungkinkan. Alangkah baiknya jika lebih di *prepare*. Mengenai materi ajar, kalau yang membawakannya itu penguasaannya bagus, dalam penyampaian bagus, akhirnya materinya sampai dengan baik. Penggunaan *case* (kasus-red), kok begini, kok begitu, justru membuat lebih menarik. Dengan demikian akan terbuka untuk berdiskusi. Kendala-kendala di lapangan yang kami hadapi juga diharapkan ada salurannya, sebaiknya ada tindak lanjutnya. Maksudnya menjembatani masukan-masukan yang kita alami tersebut.”

Lalu, bagaimana dengan pelayanan diklat di Pusdiklat Pajak sendiri?

BMF : “Pengajar baik-baik semua, petugas diklat juga baik. Asrama juga lumayan, kalau saya kurangnya cuma satu: kamar mandi. Mungkin tenaga kebersihannya ditambah karena yang jarang kita pakai malah kurang sentuhan. Kalau secara keseluruhan sih bagus. Saya terakhir ikut diklat itu 10 tahun yang lalu.”

Diklat ini jauh lebih baik. Asramanya lebih bagus, kelasnya lebih bagus dan bersih. Secara fasilitas lebih baik. Intinya, yang pertama itu kebersihan, mau makanannya model apapun, kalau bersih kita *no problemo*. Kalau kamar, mau seperti apapun, asal bersih, kita gak masalah. Oh iya, kalau senam pagi, maunya sih kita diberikan suplemen.”

MNP : “Secara umum sudah cukup bagus. Dimana-mana kalau masalah toilet itu sudah biasa ya. Peraturan memang sebaiknya ditulis, karena orang datang dari berbagai daerah, kebudayaan dan kebiasaan. Ini masalah kebiasaan. Toilet memang sebanyak-banyaknya disediakan, tapi mungkin standarnya lebih diperketat. Masalah *pake* gak *dipake* itu nomor sepuluh, tapi yang jelas dibuka semua toiletnya. Prasarana makanan oke. Kalau makanan standarnya sudah hotel ya.”

SW : Dibanding saya diklat dulu sekarang sudah lebih bagus. Apalagi saya dapat asrama baru, sudah sangat bagus fasilitasnya.

Bisa deskripsikan diklat ini dalam 3 kata?

SW, BMF, MNP: Bagus, Bermanfaat, Menyenangkan. Menyenangkan bertemu dengan orang lain, Diklatnya bagus, dan Bermanfaat untuk pekerjaan.





we ~~I~~ ♥ Bu Agustin

**BERI KAMI RESPEK,
ANDA PUN AKAN KAMI BERI**

OLEH : SAMPURNA BUDI UTAMA

Apa kabar Sahabat?

Para leader di lingkungan Kemenkeu yang dibanggakan, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu hal: seberapa besar respek Anda kepada para anak buah?

Setelah Anda menghadirkan kembali praktik-praktik kepemimpinan Anda selama ini berkaitan dengan pertanyaan tersebut, saya persembahkan tulisan ringan berikut untuk Sahabat sekalian...

Apa yang membuat seorang pemimpin diikuti dan dicintai oleh para bawahannya? Sehingga membuat mereka, dengan kesadaran yang mantap, rela menaruh loyalitas yang tinggi kepada sang pemimpin.

Salah satu jawabannya adalah karena sang pemimpin meletakkan respek yang tinggi terhadap para bawahannya. Pemimpin seperti itu, seakan memiliki perbendaharaan sikap hormat yang tidak pernah kering hingga mampu menghargai setiap bawahannya. Maka, sangat wajar jika kemudian timbal-balikannya akan didapat dari para bawahannya.

Kata *respect* dalam kamus Webster diartikan sebagai *to look back, act of looking back, an act of giving particular attention*. Dalam bahasa kita, respek bisa diterjemahkan sebagai memperhatikan orang yang berada dibelakangnya, memberi kepedulian pada bawahan, atau menyatakan rasa hormat kepada orang lain.

John C Maxwell, dalam *Becoming a Person of Influence*, mengingatkan: "Suatu kesalahan paling umum yang sering terjadi diantara para pemimpin adalah kegagalan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada pihak lain". Senada dengan itu, J.C Staehle menemukakan, pada kasus yang dialami para pegawai di Amerika, ternyata penyebab nomor satu ketidakpuasan di antara para pegawai adalah kegagalan atasan/pemimpin untuk memberikan penghargaan pada mereka.

Tentu saja dengan mudah kita dapat menyimpulkan: sangat sulit bagi seseorang untuk mengikuti orang yang tidak dapat menghargai bawahan dan apa yang telah mereka lakukan.

Mengutip Kouzes dan Posner, dalam *A Leaders Legacy*, loyalitas bukanlah hal yang dapat dituntut oleh seorang pemimpin dari para pengikutnya, melainkan apa yang dipersembahkan pengikut/bawahan kepada seseorang pemimpin yang layak mendapatkan loyalitas tersebut.

Sebenarnya, apa sih susahnyanya menyapa dan memberi pengakuan atas eksistensi dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para bawahan kita? Padahal, sedikit pengakuan saja sudah dapat memberi pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang sepanjang umurnya. Sebab, bukankah setiap manusia memiliki *self esteem* yang membutuhkan pemenuhan dalam bentuk apresiasi dari orang lain?

Jika ini dapat kita pahami, insya Allah tidaklah sukar bagi kita untuk menyadari bahwa mestinya menaruh rasa hormat kepada orang lain itu bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan diri. Dengan menghormati, kita akan dihormati. Dengan memahami para bawahan terlebih dahulu, sang pemimpin akan dimengerti oleh bawahannya. Demikianlah, hubungan sebab akibat itu terjalin.

Di titik ini, kita semakin menyadari mengapa nilai-nilai komitmen berupa kesediaan untuk mengakui kontribusi dengan menunjukkan apresiasi terhadap keberhasilan individual dalam praktik kepemimpinan yang menerapkan *encourage the heart* sangat diperlukan.

"Cobalah mengingat nama orang-orang dan luangkan waktu untuk menunjukkan bahwa Anda peduli pada mereka. Jadikan orang lain sebagai prioritas diatas hal-hal lain dalam kehidupan Anda, termasuk agenda dan jadwal Anda. Jangan lupa juga untuk memberikan pengakuan pada orang lain di setiap kesempatan. Pengakuan itu akan membangun dan memotivasi mereka. Pengakuan itu akan membuat Anda menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka.", demikian saran John C. Maxwell, pakar leadership itu.

Ada baiknya, kita mencatat pengalaman kawan saya, seorang eselon III dari DJP, Bu Agustin Vita Avantin dalam memori kita. Testimoni beliau mengatakan, "Ternyata, memang dengan menyentuh nurani, menghargai dan memanusiasi pegawai dampaknya luar biasa. Mereka menjadi sangat loyal dan tergerak untuk memberikan yang terbaik. Pegawai yang biasa membolos jadi lebih sering setor muka dan menawarkan bantuan, yang suka *mbalelo* (membangkang) jadi lebih sering menawarkan inovasi dan aktif dalam penyelesaian masalah". Nah jika begitu, beri kami respek maka Anda pun akan kami beri.

Salam hangat...

"Ternyata, memang dengan menyentuh nurani, menghargai dan memanusiasi pegawai dampaknya luar biasa. Mereka menjadi sangat loyal dan tergerak untuk memberikan yang terbaik. Pegawai yang biasa membolos jadi lebih sering setor muka dan menawarkan bantuan, yang suka *mbalelo* (membangkang) jadi lebih sering menawarkan inovasi dan aktif dalam penyelesaian masalah"

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jan – Feb

PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ILT IV Pajak Angk. I	18 Februari – 29 Maret 2013
ILT III Pajak	20 Februari – 5 April 2013
Diklat Berbasis Kompetensi III	4 – 7 Februari 2013
Diklat Berbasis Kompetensi IV	11 – 14 Februari 2013
Prajabatan II Angk. I	4 – 22 Februari 2013
Prajabatan II Angk. II	25 Februari – 15 Maret 2013
Diklatpim Tk. III Angk. I	18 Februari – 6 April 2013
Diklatpim Tk. IV Angk. I	4 Februari – 16 Maret 2013
Diklatpim Tk. IV Angk. II	11 Februari – 23 Maret 2013
Diklatpim Tk. IV Angk. III	25 Februari – 6 April 2013

PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

DTSS Kuasa Pengguna Anggaran (1)	28 Januari – 1 Februari 2013
Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa (1)	28 Januari – 1 Februari 2013
Diklat Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa (2)	28 Januari – 1 Februari 2013
DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (1)	4 – 8 Februari 2013
DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (2)	4 – 8 Februari
DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai (1)	18 – 22 Februari 2013
DTSS Direktorat Jenderal Anggaran (1)	28 Januari – 1 Februari 2013
DTSS Penyegaran Penguji Tagihan (1)	25 Februari – 1 Maret 2013
DTSS Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat (1)	04 – 15 Februari 2013
DTSS Penguji Tagihan (1)	4 – 15 Februari 2013
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (1)	11 – 22 Februari 2013
DTSS Pengadaan Barang/Jasa (2)	11 – 22 Februari 2013
DF Bendahara Pengeluaran (1)	18 Februari – 5 Maret 2013
DTSD Tingkat II Perbendaharaan (Spesialisasi KN) (1)	25 Februari – 16 Mei 2013
DTSD Tingkat II Perbendaharaan (Spesialisasi KN) (2)	25 Februari – 16 Mei 2013

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

DTU Orientasi Pegawai Baru DJKN Angk. I	4 – 12 Februari 2013
DTU Orientasi Pegawai Baru DJKN Angk. II	4 – 12 Februari 2013
DTSS Pemeriksaan Piutang Negara Dasar	5 – 20 Februari 2013
DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Pemula (Bagi Pegawai DJKN)	12 – 19 Februari 2013
DTSD Kekayaan Negara Tingkat I	18 Februari – 6 Maret 2013
DTSD Kekayaan Negara Tingkat II	25 Februari – 20 Maret 2013

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

Diklat Manajemen Perencanaan Diklat : Desain Program Diklat	14 – 18 Januari 2013
Diklat Evaluasi Renstra dan Lakip	14 – 18 Januari 2013
Diklat Manajemen Penyelenggaraan Diklat	28 Januari – 1 Februari 2013
Diklat Penyusunan Efektif Laporan Hasil Audit	28 Januari – 1 Februari 2013
Placement Test TOEFL Preparation	4 Februari 2013
Diklat Teori Ekonomi Makro – Tingkat Dasar	5 – 7 Februari 2013

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM

Diklat Pranata Komputer Ahli	6 – 15 Februari 2013
Diklat Desain Pengelolaan Database	11 – 15 Februari 2013
Diklat Manajemen Perencanaan Diklat : Desain Program Diklat	11 – 15 Februari 2013
Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	11 – 15 Februari 2013
Placement Test Microsoft Office	11 Februari 2013
Diklat Teknik Investigasi – Tingkat Dasar	11 – 27 Februari 2013
Diklat Administrasi Jaringan Komputer	18 – 22 Februari 2013
Diklat Bussiness English	18 – 22 Februari 2013
Diklat Manajemen Evaluasi Diklat	18 – 22 Februari 2013
Diklat Menulis Untuk Media Massa	19 – 21 Februari 2013
Diklat Analisis Beban Kerja	25 Februari – 1 Maret 2013
Training Service Level Agreement	25 Februari – 1 Maret 2013
Diklat Control Self Assessment	25 Februari – 1 Maret 2013

PUSDIKLAT PAJAK

DTSD Pajak I	28 Januari – 3 April 2013
DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angk. I	28 Januari – 1 Februari 2013
DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angk. II	4 – 8 Februari 2013
DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angk. III	11 – 15 Februari 2013
DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angk. IV	18 – 22 Februari 2013
DTSS Account Representative Tingkat Dasar Angk. V	25 Februari – 1 Maret 2013
DTSS Jurusita Pajak Angk. I	7 – 18 Januari 2013
DTSS Penelaah Keberatan Angk. I	7 – 11 Januari 2013
DTSS Penelaah Keberatan Angk. II	14 – 18 Januari 2013
DTSS Operator Console Pajak Angk. I	7 – 25 Januari 2013
DTSS PPN Tingkat Menengah Angk. I	7 – 11 Januari 2013
DTSS PPh Tingkat Menengah Angk. I	14 – 18 Januari 2013
DTSS Transfer Pricing Angk. I	21 – 25 Januari 2013
DF. Pemeriksa Dasar Angk. I	7 – 18 Januari 2013
DF. Pemeriksa Dasar Angk. II	21 Januari – 1 Februari 2013
DF. Pemeriksa Dasar Angk. III	4 – 15 Februari 2013
DF. Pemeriksa Dasar Angk. IV	19 Februari – 1 Maret 2013

PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

DTSD Kepabeanaan dan Cukai Angk. I	
DTSS Teknik Pemeriksaan	11 Februari – 17 April 2013
DTSS Intelijen Taktis Angk. I	28 Januari – 15 Februari 2013
DTSS Penyidik Kepabeanaan dan Cukai Angk. I	28 Januari – 8 Februari 2013
DTSS Kepatuhan Internal	18 Februari – 5 Maret 2013
DTSS Client Coordinator	28 Januari – 21 Februari 2013
DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara	28 Januari – 15 Februari 2013
DTSS Ketrampilan Penggunaan X-Ray Cabin dan Cargo Angk. I	18 – 27 Februari 2013
DTSS Jurusita Angk. I	28 Januari – 8 Februari 2013
DF Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angk. I	28 Januari – 8 Februari 2013
Workshop Ketua Auditor	11 Februari – 13 Maret 2013
DTU Kesamaptaan Angk. I	25 Februari – 1 Maret 2013
	4 Februari – 4 Maret 2013

Keterangan

DTSD : Diklat Teknik Substantif Dasar

DTSS : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi

DTU : Diklat Teknik Umum

DF : Diklat Fungsional

Info lebih lanjut hubungi

Call Center Halo BPPK 021-7264984

atau klik www.bppk.depkeu.go.id

BPPK (Work)
160 / 1 of 7

BPPK

Selamat, Khotimatus
Sadiyah anda lulus diklat
Bendahara Pengeluaran
Angkatan II Tahun 2012.

20:31

SMS CENTER BPPK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini tampak dengan menjamurnya penggunaan telepon seluler. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Telpon Seluler Indonesia (ATSI), pada tahun 2010 pengguna telepon seluler di Indonesia berjumlah 180 juta orang dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut kurang lebih sekitar 60% penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler.

Salah satu layanan yang disediakan pada telepon seluler adalah penyampaian pesan singkat atau yang sering disebut SMS (*Short Message Service*). SMS adalah protokol layanan pertukaran pesan text singkat (sebanyak 160 karakter per pesan)

antar telepon. Awalnya, SMS merupakan bagian dari standar teknologi seluler *Global System for Mobile Communication* (GSM). Layanan SMS terus berkembang hingga saat ini telah tersedia di teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) dan telepon rumah *Public Switched Telephone Network* (PSTN).

Layanan SMS ini memungkinkan seseorang mengirimkan pesan ke satu orang maupun banyak orang secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Selain itu, layanan SMS juga dapat digunakan untuk menjawab pesan yang masuk dan mengirimkannya kembali. Mulai muncul kendala ketika pesan yang masuk banyak dan memerlukan jawaban yang cepat serta berbeda-beda. Untuk menjawab satu per satu pesan masuk,

tentu akan merepotkan pengguna dan membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karenanya, diperlukan suatu layanan SMS yang dapat menerima dan memberikan jawaban secara otomatis dan cepat. Layanan inilah yang sering disebut dengan *SMS Center*.

Apa itu SMS Center?

SMS Center merupakan aplikasi yang memberikan layanan informasi melalui media SMS sehingga dapat menyediakan informasi dan mengirim secara otomatis dan cepat. Dengan adanya layanan ini, pengguna dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Misalnya dengan mengetikkan kode khusus seperti REG untuk pendaftaran, INFO untuk mengakses data atau

informasi yang diperlukan. Jawaban atau request permintaan pengguna dapat dilihat pada telepon seluler masing-masing dalam waktu yang singkat.

Kenapa BPPK menggunakan SMS Center?

Ide penggunaan SMS Center tak lepas dari kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kelulusan diklat kepada pegawai atau peserta. Kendala-kendala ini seperti; terbatasnya akses internet pegawai sebagai media penyampaian informasi, ketidakstabilan koneksi internet, mahal biaya akses internet pada sebagian peserta dan sebagainya.

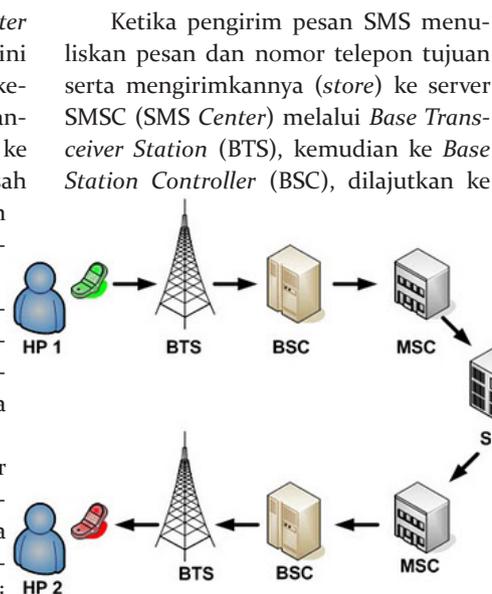
Untuk mengatasi hal tersebut BPPK berusaha memberikan layanan prima kepada pengguna atau peserta diklat dengan menyediakan layanan SMS Center BPPK. Adanya layanan SMS Center ini peserta dapat memperoleh informasi kelulusan diklatnya dari gengaman tangannya, yaitu dengan mengirimkan SMS ke nomor SMS Center BPPK, tanpa bersusah payah mengakses website atau telepon yang memerlukan waktu lama dan biaya mahal.

Pertimbangan lain BPPK menggunakan media SMS sebagai media alternatif dalam penyampaian hasil kelulusan diklat berdasarkan beberapa fakta antara lain sebagai berikut adalah:

1. Besarnya pengguna telepon seluler di Indonesia. Berdasarkan penelitian ATSI tahun 2010 pengguna telepon seluler di Indonesia berjumlah 180 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Biaya SMS yang relatif murah berkisar antara 300-350 rupiah untuk sekali kirim.
3. Wilayah jangkauan dari layanan SMS yang luas sesuai operator yang digunakan.
4. Banyaknya operator telepon seluler di Indonesia yang memungkinkan terjadi persaingan pasar, sehingga kualitas layanan serta harga yang akan semakin baik dan murah.
5. Sebagian besar peserta diklat BPPK adalah pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki telepon seluler.

Bagaimana SMS Center BPPK bekerja?

Sebelum membahas cara kerja SMS Center BPPK, kita perlu mengetahui dahulu bagaimana mekanisme dalam pengiriman SMS. Dalam pengiriman SMS dikenal mekanisme *store and forward*. SMS merupakan data tipe *asynchronous message* yang pengiriman datanya dilakukan dengan mekanisme *protokol store and forward*. Hal ini berarti bahwa pengirim dan penerima SMS tidak perlu berada dalam status berhubungan (*connected/online*) satu sama lain ketika bertukar pesan SMS. Untuk lebih jelas proses pengiriman SMS dapat dilihat pada gambar berikut:



Ilustrasi: ciptamedia-sms-broadcast.blogspot.com

Mobile Switching Center (MSC) yang kemudian sampai di SMSC. Selanjutnya, SMSC mengecek (lewat HLR - Home Location Register) untuk mengetahui apakah telepon seluler tujuan sedang aktif atau tidak serta dimana telepon seluler tujuan tersebut berada. Jika telepon seluler sedang tidak aktif maka pesan disimpan di SMSC, menunggu MSC memberitahukan bahwa telepon seluler sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu yaitu *validity period* dari pesan SMS itu sendiri. Jika telepon seluler tujuan aktif, maka SMSC akan meneruskan

pesan (*forward*) ke nomor telepon tujuan melalui MSC dan melewati jaringan yang sedang mengelola penerima (BSC dan BTS). Ketika pesan SMS telah terkirim dan diterima oleh telepon seluler tujuan, maka pengirim akan menerima pesan singkat (*konfirmasi*) bahwa pesan telah terkirim (*message sent*) dari SMSC.

Pada beberapa tipe telepon seluler terdapat sebuah fasilitas perintah khusus yang disebut dengan *AT command*. Disebut dengan *AT command* karena kode perintahnya selalu diawali dengan "AT+" yang diikuti perintah khusus sesuai dengan setiap perintah kontrol yang dimilikinya. Mode komunikasi yang digunakan dalam penggunaan *AT command* adalah komunikasi serial. Dengan komunikasi serial, maka telepon seluler dapat dihubungkan dengan peralatan lain seperti *Personal Computer* (PC) dan mikrokontroler. *AT command* sangat penting jika kita menghubungkan periperiferal lain PC atau mikrokontroler ke telepon seluler. Dengan digunakannya komunikasi serial maka telepon seluler juga punya nilai *baudrate* yang menentukan kecepatan data yang dapat dikirim dan diterima telepon seluler. Untuk mengetahui nilai *baudrate* masing-masing telepon seluler bisa melihat dari datasheet yang dikeluarkan pabrik pembuatnya.

Perintah yang bisa ditangani oleh *AT command* sangat beragam seperti membaca SMS, menghapus SMS, mengirim SMS, mematikan telepon seluler dan sebagainya. *AT Command* untuk SMS, biasanya diikuti oleh data I/O yang diwakili oleh unit-unit *Protokol Data Unit* (PDU). Melalui standar perintah *AT Command* dan PDU inilah, komputer atau mikrokontroler dapat mengirim atau menerima SMS secara otomatis berdasarkan program yang dibuat.

Dengan memanfaatkan perintah *AT command* dan PDU BPPK mengembangkan SMS Center. Pada tahap awal pengembangan, BPPK memanfaatkan SMS Center untuk menyampaikan informasi kelulusan diklat kepada peserta. SMS Center BPPK memiliki dua modul utama yaitu modul *SMS Center Engine*

dan SMS Center Manager. Modul SMS Center Engine berfungsi untuk menerima, memproses dan mengirimkan respons kepada para peserta diklat yang me-request informasi kelulusan dan nilai diklat yang mereka peroleh. Sedangkan modul SMS Center Manager digunakan oleh penyelenggara diklat atau operator diklat untuk memasukkan data-data peserta diklat, kelulusan, dan nilai-nilai yang diperoleh masing-masing peserta diklat.

Cara kerja SMS Center BPPK sebagai media alternatif penyampaian hasil kelulusan diklat dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Operator Diklat mengisi data peserta dan kelulusan ke SMS Center

melakukan transfer data peserta dan kelulusan ke sistem SMS Center BPPK. Sedangkan untuk melakukan update nilai peserta, Operator Diklat masuk ke SMS Center Manager.

2. Peserta diklat mengirimkan request informasi kelulusan dengan cara mengirimkan SMS ke nomor yang digunakan pada SMS Center BPPK dengan format INFOLULUS untuk mendapatkan informasi kelulusan dan INFONILAI untuk mendapatkan informasi nilai yang diperolehnya.

3. Modul SMS Center Engine kemudian melakukan validasi request yang dikirimkan oleh para peserta diklat dan kemudian memproses SMS tersebut berdasarkan keyword yang dikirimkan oleh para peserta

request dan response ke dalam database SMS Center BPPK

Apa saja perangkat yang dibutuhkan?

Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun SMS Center meliputi perangkat keras dan lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan seperti; sistem operasi, web server, Relational Database Management System (RDBMS) dan aplikasi SMS Center itu sendiri. Untuk perangkat keras utama yang dibutuhkan adalah komputer server dan modem. Spesifikasi perangkat yang dapat digunakan untuk SMS Center adalah:

1. Komputer Server dengan spesifikasi:

- Processor : Dual Xeon 2.8 Ghz
- Memory : 8 GB
- Hard Drive : 250 GB SATA II
- Sistem Operasi: Microsoft Windows 2003 R2
- Web Server Application: Internet Information Service (IIS) 6
- Integrated with .NET Framework 1.1
- RDBMS
- Microsoft SQL Server 2008

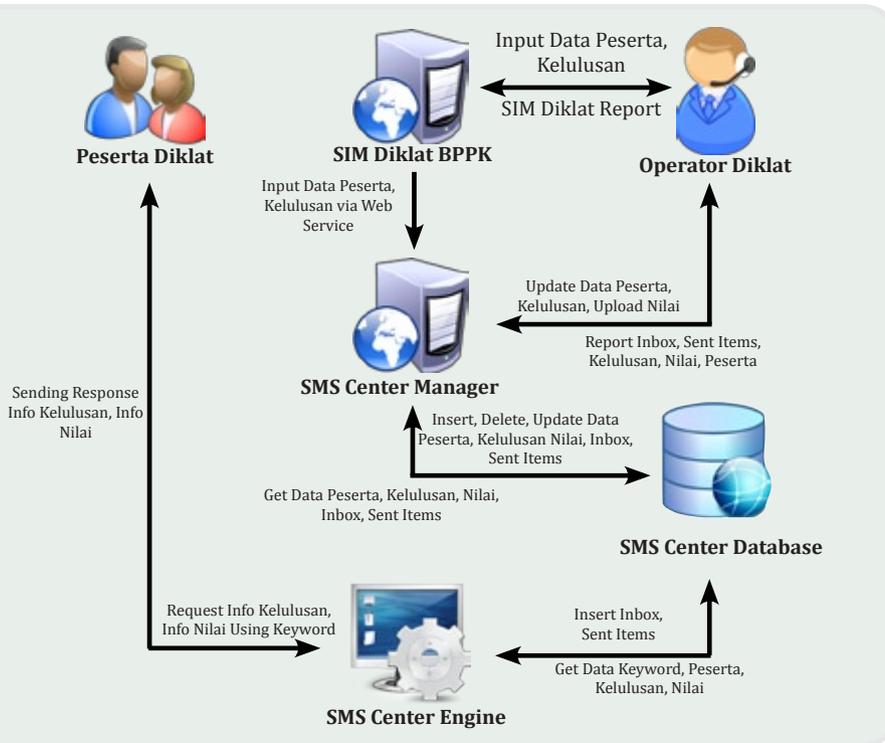
2. Modem dengan spesifikasi:

- Dualband GSM 900/1800 MHz.
- SimToolKit Kelas 2
- AT command set (GSM 07,05, 07,07 dan fungsi AT)
- Support Cell Broadcast, Teks dan PDU dan Karakter UCS2

Simpulan

SMS Center BPPK merupakan program aplikasi pengembangan untuk meningkatkan layanan kediklatan kepada seluruh stakeholders, khususnya peserta diklat. Pada tahap awal pengembangan saat ini baru sebatas penyediaan informasi kelulusan diklat secara mudah dan cepat. Kedepannya, SMS Center BPPK akan dikembangkan untuk penyediaan layanan informasi yang lebih luas, seperti jadwal diklat, materi diklat, lokasi diklat, dan hal-hal lain terkait dengan kediklatan BPPK.

*M. Ichsan adalah Pranata Komputer, dan Suharyadi adalah Pelaksana pada Bagian TIK, Sekretariat BPPK



yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) Diklat BPPK. Pada SIM Diklat terdapat fitur yang digunakan untuk mentransfer data peserta diklat ke sistem SMS Center BPPK. Dengan fitur tersebut maka operator diklat cukup menekan satu tombol pada SIM Diklat untuk

diklat. Setelah pemrosesan request selesai dilakukan, modul SMS Center Engine kemudian mengirimkan response atau SMS jawaban ke nomor seluler peserta diklat yang me-request informasi kelulusan tersebut. Selain itu, modul SMS Center Engine juga akan menyimpan semua

Judul Buku	: The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World
Penulis / Alih Bahasa	: Michael Spence, Winner of the Nobel Prize in Economics
Penerbit / Cetakan	: Farrar, Straus and Giroux/ First Edition, 2011
Tebal	: xvi + 296 halaman
ISBN	: 978-0-374-15975-7 (alk. paper)

OLEH : ROBERTO AKYUWEN



The Next Convergence: The Future of Economic Growth in A Multispeed World

Buku ini menguraikan tentang abad ketiga Revolusi Industri, yaitu periode kita hidup saat ini. Selama beberapa ratus tahun hingga 1750, pertumbuhan ekonomi diabaikan di seluruh belahan bumi. Sebagian besar manusia berada dalam kondisi miskin, meskipun terdapat sebagian kelompok elit, dan di wilayah tertentu terdapat kelas menengah yang berorientasi komersial. Menjadi kaya dan berkuasa memiliki hubungan yang sangat erat. Pada kehidupan tanpa pertumbuhan, interaksi yang terjadi identik dengan *zero-sum game*. Situasi ini berlangsung di hampir seantero dunia.

Sekitar tahun 1750, Inggris memulai tahap baru, yaitu revolusi industri. Pendapatan per kapita mulai meningkat dan terjadi percepatan pertumbuhan. Pola ini menyebar dengan cepat pada abad ke-19 ke daratan Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Pertumbuhan pesat terjadi terus-menerus selama 200 tahun hingga terjadinya Perang Dunia II. Sebagian pertumbuhan merembes ke Amerika Selatan, meskipun tidak utuh.

Pada tahun 1950, rata-rata pendapatan penduduk di negara-negara tersebut telah meningkat 20 kali, dari sekitar USD500 per tahun menjadi lebih dari USD10,000 per tahun. Rata-rata penda-

patan penduduk di kebanyakan negara industri bahkan jauh lebih tinggi. Pertumbuhan ini didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi, logistik, komunikasi, manajemen dan inovasi kelembagaan, serta perubahan tata kelola dan cara interaksi antara pemerintah dan politik dengan perekonomian modern.

Pergeseran dramatik pola pertumbuhan melahirkan negara-negara maju atau industri. Keberadaan negara-negara ini menurut Michael Spence mempengaruhi kehidupan sekitar 15 persen populasi dunia. Di luar negara-negara industri, pertumbuhan juga terjadi, namun sangat lambat. Penduduk tetap miskin, karena kolonialisme menguras kekayaan dan mengalokasikannya ke negara-negara industri yang memiliki kekuatan imperialis. Mulai digunakannya kereta api, kemudian mobil, listrik, dan telepon semakin memperlebar jurang perbedaan di antara negara-negara maju dengan negara-negara lainnya.

Gambaran perekonomian dunia pada tahun 1950 merupakan hasil dari 200 tahun sejarah ekonomi, yaitu periode terobosan bagi minoritas populasi dunia. Sejumlah 750 juta orang berdomisili di negara-negara maju, sedangkan lebih dari 4 miliar penduduk lainnya terting-

gal. Dunia belum pernah mengalami perbedaan yang sebesar ini.

Setelah usainya Perang Dunia II, pola yang terbentuk mengalami pergeseran. Negara-negara berkembang mulai tumbuh. Pertumbuhan pada awalnya berlangsung dengan lambat dan terisolasi. Namun, secara bertahap, pertumbuhan semakin menyebar dan mengalami percepatan.

Kondisi ini merupakan indikasi dimulainya perjalanan panjang dari abad perekonomian global. Sepertinya titik akhir yang dituju adalah dunia dengan 75 persen atau lebih penduduk hidup di negara-negara maju dengan peningkatan pendapatan yang mendorong konsumsi dan penggunaan energi. Di negara-negara berkembang yang tumbuh pesat, telah terjadi pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih selama lebih dari seperempat abad. Sebagai perbandingan, pertumbuhan yang tinggi dan pesat di dalam 200 tahun Revolusi Industri hanya berkisar 2-2,5 persen.

Buku ini memaparkan kondisi dunia pada kurun sekitar 100 tahun, dimulai sejak tahun 1945 menuju pertengahan abad ke-21. Diuraikan mengenai keberlanjutan Revolusi Industri di negara-negara maju dan pertumbuhan dramatis di negara-negara berkembang. Revolusi yang kedua



Michael Spence mencoba menjelaskan perubahan yang diikuti oleh pergeseran pola aktivitas ekonomi dan kekuatan yang cepat secara lebih komprehensif.

ini dapat disebut dengan istilah Revolusi Inklusif. Setelah dua abad berlangsungnya perbedaan atau divergen yang sangat lebar dan pesat, maka dalam perkembangan selanjutnya pola penggabungan atau konvergen mulai tampak. Kembalinya konvergen yang dikombinasikan dengan pertumbuhan membawa implikasi yang dalam. Michael Spence mencoba menjelaskan perubahan yang diikuti oleh pergeseran pola aktivitas ekonomi dan kekuatan yang cepat secara lebih komprehensif.

Bagian I buku menguraikan karakteristik pergeseran yang cepat pada perekonomian global pasca Perang Dunia II. Digambarkan kondisi perekonomian global dan bagaimana kondisi demikian dapat dicapai dalam 50 tahun terakhir. Bagian II menjelaskan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Pertumbuhan yang tinggi atau rendah yang dialami oleh suatu negara tidak dapat dijelaskan dengan faktor-faktor ekonomi semata. Kepemimpinan, politik, struktur tata kelola, dan efektivitas pemerintah memainkan peran yang penting.

Bagian III mengungkapkan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dari krisis ekonomi dan keuangan yang melanda dunia sejak tahun 2008. Krisis telah membawa banyak pelajaran tentang tekstur saling ketergantungan atau interdependensi yang baik. Bagian IV memuat uraian-uraian mengenai masa depan serta sekumpulan isu, kekuatan, dan tren yang perlu ditata agar pola penyebaran pertumbuhan pendapatan yang tinggi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terdapat mekanisme pelambatan ekonomi, tata kelola, sumber daya alam, dan lingkungan yang dapat memperlambat proses atau bahkan menghentikan pertumbuhan. Michael Spence menyebutnya sebagai persoalan-persoalan yang ditambahkan atau *“adding-up problems”*.

Ketersediaan dan biaya energi kemungkinan menyebabkan pelambatan pertumbuhan. Jika semua atau sebagian besar negara-negara berkembang berupaya untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang bersifat padat karya bagi perekonomian global, maka pasar global kemungkinan tidak dapat menyerapnya. Situasi ini bermakna bahwa negara yang lebih miskin dan kurang kompetitif tidak akan menemukan cara untuk memasuki perekonomian global sebagai suatu persyaratan untuk tumbuh. Peningkatan interkoneksi perekonomian dan sistem keuangan global telah mendahului sistem tata kelola.

Michael Spence berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas agar dinamika pertumbuhan di negara-negara berkembang dapat dipahami dengan lebih baik, termasuk hubungan dan saling ketergantungan pertumbuhan tersebut dengan perekonomian global. Bagi kebanyakan orang yang tinggal di negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), kondisi dan pertumbuhan negara-negara berkembang relatif berada di luar kisaran hidup mereka sehari-hari. Dampak dari pertumbuhan tersebut terhadap perekonomian global dan negara-negara maju sangat kompleks dan dinamis.

Untuk memenuhi tantangan di masa depan, yaitu kesejahteraan ekonomi global secara berkelanjutan, sangat membantu atau bahkan sangat penting untuk memiliki suatu pengetahuan dasar mengenai evolusi yang dialami oleh bagian dunia yang semakin besar dan penting ini (negara-negara berkembang). Reaksi dari negara-negara berkembang terhadap isu-isu internasional dipengaruhi oleh pengalaman dan prospek pertumbuhan mereka. Pertumbuhan di negara-negara berkembang telah menjadikan perekonomian mereka menjadi semakin penting. Pilihan-pilihan yang diambil mereka berdampak signifikan terhadap sesama

negara berkembang maupun negara-negara maju.

Krisis tahun 2008 hampir menyebabkan terjadinya Depresi Besar kedua. Tindakan yang cepat dan efektif yang diambil pemerintah dan bank sentral di negara-negara yang terkena krisis telah menghindarkan terjadinya kondisi yang lebih buruk. Negara-negara berkembang, khususnya *emerging economies*, mampu mengatasi dampak krisis dan pulih dengan cepat. Negara-negara ini (Cina, India, dan Brasil) telah menjadi mesin utama pertumbuhan global. Sebaliknya, negara-negara maju menghadapi pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, tekanan fiskal, dan akumulasi tingkat hutang yang tinggi dalam periode yang panjang. Dalam lingkungan yang kompleks ini, negara-negara mencoba bekerjasama untuk menstabilkan dan menyeimbangkan perekonomian dunia serta mengembalikan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pada periode pasca Perang Dunia II hingga krisis, prioritas yang memandu kerjasama internasional diatur oleh G7 yang merepresentasikan negara-negara maju. Setelah krisis, tongkat pimpinan telah diserahkan dari G7 kepada G20 yang terdiri dari negara-negara maju ditambah negara-negara berkembang yang besar dan tumbuh tinggi (*emerging countries*). Kondisi ini menurut Michael Spence adalah suatu transisi alamiah, meskipun dipercepat oleh krisis.

Pertanyaan kuncinya adalah apakah G20 dapat melakukan tugasnya dengan efektif. Menjaga perekonomian global tetap terbuka, mengembalikan permintaan, menata ulang sistem keuangan, mencegah siklus deflasi yang merusak, dan menciptakan mekanisme internasional yang efektif dalam merespon *shocks* merupakan aspek-aspek penting yang menjadi agenda G20. Kita belum tahu hasilnya, namun sebagian besar bergantung pada kemampuan negara-negara maju dan berkembang untuk bekerjasama secara kooperatif.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

Kang Edu



Oleh: Bimo





Peringatan Hari OEANG Republik Indonesia

foto: Eros Lassa Mursalin

Puncak acara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) ke-66 ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di lapangan Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan Menteri Keuangan menyerahkan Satya Lencana Karya Satya XXX kepada pegawai Kementerian Keuangan.



Family Gathering Kemenkeu

foto: Eros Lassa Mursalin

Bertempat di Stadion Bea dan Cukai, Rawamangun, keluarga besar Kementerian Keuangan menghadiri peringatan Hari Oeang ke-66.





NILAI DAN PERILAKU UTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN

INTEGRITAS (INTEGRITY)	PROFESIONALISME (PROFESSIONALISM)	SINERGI (SYNERGY)	PELAYANAN (SERVICE)	KESEMPURNAAN (EXCELLENCE)
(1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya	(3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas	(5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati	(7) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan	Berwawasan ke depan dan adaptif
Bertindak transparan dan konsisten	Memiliki kepercayaan diri yang tinggi	Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan	Menghindari arogansi kekuasaan	(9) Melakukan perbaikan terus menerus
(2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela	Bekerja efisien dan efektif	(6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik	Bersikap ramah dan santun	(10) Mengembangkan inovasi dan kreatifitas
Bertanggung jawab atas hasil kerja	Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas	Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah	(8) Bersikap proaktif dan cepat tanggap	Peduli lingkungan
Bersikap objektif	(4) Bekerja dengan hati			



Asrama Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 13/2012

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>